



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

LPPD Kota Jambi Tahun 2020



Dr. H. Syarif Fasha, ME
WALI KOTA JAMBI

Dr. dr. H. Maulana, MKM
WAKIL WALI KOTA JAMBI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	
1.1.1 PENJELASAN UMUM	
a. Undang-undang Pembentukan Daerah.....	1
b. Geografisi Wilayah.....	2
c. Jumlah Penduduk Kota Jambi	6
d. Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Kota Jambi	
e. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi	8
1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	26
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	27
c. Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah	29
d. Kegiatan Pembangunan Daerah	32
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH	
2.1 Capaian Kinerja Makro	33
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan	
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Hasil	93
2.2.5 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	104
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	
a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	107
b. Pengukuran Capaian Kinerja di bandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja	108
c. Pengukuran Capaian Kinerja di bandingkan dengan Tahun Sebelumnya	
d. Pengukuran Capaian Kinerja di bandingkan dengan Target dalam Menengah	
e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan hasil kinerja yang di capai	
f. Analisi Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja	112
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN	
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
4.1 URUSAN PENDIDIKAN	
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	114
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	115
4.1.3 Realisasi	
4.1.4 Alokasi Anggaran	118
4.1.5 Dukungan Personil	120
4.1.6 Permasalahan dan Solusi.....	123
4.2 URUSAN PEKERJAAN UMUM	
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	124
4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	
4.2.3 Realisasi.....	125
4.2.4 Alokasi Anggaran	

4.2.5 Dukungan Personil.....	126
4.2.6 Permasalahan dan Solusi	127
4.3 URUSAN PERUHAN RAKYAT	
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	128
4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	
4.3.3 Realisasi.....	129
4.3.4 Alokasi Anggaran	
4.3.5 Dukungan Personil.....	133
4.3.6 Permasalahan dan Solusi	
4.4 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
(a) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar	130
4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	131
4.4.3 Realisasi	134
4.4.4 Alokasi Anggaran	139
4.4.5 Dukungan Personil.....	140
4.4.6 Permasalahan dan Solusi	141
(b) Satuan Polisi Pamong Praja	
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar	142
4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	
4.4.3 Realisasi.....	143
4.4.4 Alokasi Anggaran	
4.4.5 Dukungan Personil.....	144
4.4.6 Permasalahan dan Solusi	
4.5 URUSAN SOSIAL	
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar	148
4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	
4.5.3 Realisasi	
4.5.4 Alokasi Anggaran	
4.5.5 Dukungan Personil	
4.5.6 Permasalahan dan Solusi	
4.6 URUSAN KESEHATAN	
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	149
4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	
4.6.3 Realisasi	150
4.6.4 Alokasi Anggaran	152
4.6.5 Dukungan Personil	
4.6.6 Permasalahan dan Solusi	153
BAB V PENUTUP	159

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Jambi Tahun 2020 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (3) dimana Bupati/Walikota Wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana maksud Pasal 69 Ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Jambi Tahun 2020 merupakan laporan berkala setiap tahunnya yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Penyusunan LPPD merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan strategi Pemerintah Kota Jambi berdasarkan (RPJMD) Tahun 2020 dalam pelaksanaan dari Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui capaian Pemerinta Kota Jambi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Jambi Tahun 2020. Semoga materi LPPD ini dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Pusat dalam memberikan panduan dan pembinaan Pemerintahan Daerah serta bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan lebih lanjut untuk tahun-tahun berikutnya.

Jambi, Maret 2021

WALIKOTA JAMBI



DR. H. SYARIF FASHA, ME

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 PENJELASAN UMUM

A. Undang – Undang Pembentukan Daerah

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 016 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 10 Tahun 2020);
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 61);
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 74);

B. Geografis Wilayah

Kota Jambi merupakan Ibukota Provinsi Jambi yang mana wilayahnya dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Muaro Jambi baik dari arah Utara, Selatan, Barat maupun Timur, Luas Kota Jambi 205,38 Km.

Kota Jambi terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan dan terdiri dari 62 (Enam Puluh Dua) Kelurahan yaitu :

1. Kecamatan Kota Baru
 - 1) Kelurahan Suka Karya
 - 2) Kelurahan Simpang III Sipin
 - 3) Kelurahan Paal V (Lima)
 - 4) Kelurahan Kenali Asam Bawah
 - 5) Kelurahan Kenali Asam Atas
2. Kecamatan Telanaipura
 - 1) Kelurahan Simpang IV (Empat) Sipin
 - 2) Kelurahan Buluran Kenali
 - 3) Kelurahan Teluk Kenali
 - 4) Kelurahan Penyengat Rendah
 - 5) Kelurahan Pematang Sulur

3. Kecamatan Jelutung
 - 1) Kelurahan Jelutung
 - 2) Kelurahan Kebun Handil
 - 3) Kelurahan Cempaka Putih
 - 4) Kelurahan Talang Jauh
 - 5) Kelurahan Lebak Bandung
 - 6) Kelurahan Payo Lebar
 - 7) Kelurahan Handil Jaya
4. Kecamatan Pasar Jambi
 - 1) Kelurahan Pasar Jambi
 - 2) Kelurahan Beringin
 - 3) Kelurahan Sungai Asam
 - 4) Kelurahan Orang Kayo Hitam
5. Kecamatan Jambi Timur
 - 1) Kelurahan Sijenjang
 - 2) Kelurahan Kasang Jaya
 - 3) Kelurahan Talang Banjar
 - 4) Kelurahan Budiman
 - 5) Kelurahan Sulanjana
 - 6) Kelurahan Kasang
 - 7) Kelurahan Tanjung Sari
 - 8) Kelurahan Rajawali
 - 9) Kelurahan Tanjung Pinang
6. Kecamatan Jambi Selatan
 - 1) Kelurahan Pasir Putih
 - 2) Kelurahan Tambak Sari
 - 3) Kelurahan The Hok
 - 4) Kelurahan Wijaya Pura
 - 5) Kelurahan Pakuan Baru
7. Kecamatan Danau Teluk
 - 1) Kelurahan Pasir Panjang
 - 2) Kelurahan Tanjung Raden
 - 3) Kelurahan Olak Kemang
 - 4) Kelurahan Tanjung Pasir

- 5) Kelurahan Ulu Gedong
8. Kecamatan Pelayangan
 - 1) Kelurahan Arab Melayu
 - 2) Kelurahan Mudung Laut
 - 3) Kelurahan Tengah
 - 4) Kelurahan Tahtul Yaman
 - 5) Kelurahan Jelmu
 - 6) Kelurahan Tanjung Johor
9. Kecamatan Alam Barajo
 - 1) Kelurahan Bagan Pete
 - 2) Kelurahan Kenali Besar
 - 3) Kelurahan Rawasari
 - 4) Kelurahan Beliung
 - 5) Kelurahan Mayang Mangurai
10. Kecamatan Danau Sipin
 - 1) Kelurahan Legok
 - 2) Kelurahan Sungai Putri
 - 3) Kelurahan Murni
 - 4) Kelurahan Solok Sipin
 - 5) Kelurahan Selamat
11. Kecamatan Paal Merah
 - 1) Kelurahan Talang Bakung
 - 2) Kelurahan Payo Selincah
 - 3) Kelurahan Eka Jaya
 - 4) Kelurahan Lingkar Selatan
 - 5) Kelurahan Paal Merah

Secara geografi wilayah Kota Jambi terletak diantara 103°30'1,67" Bujur Timur sampai 103°40'0,22" Bujur Timur, 01°30'2,98" Lintang Selatan sampai 01°40'1,07" Lintang Selatan. Geografi wilayah Kota Jambi secara keseluruhan terdiri atas daratan dengan Luas 20,538 ha atau 205,38 Km². Topografi wilayah Kota Jambi terdiri dari sebagian besar datar, bergelombang dan sedikit curam dengan Luas kemiringan lahan masing-masing sebagai berikut

- a. Datar = 11.326 ha
- b. Bergelombang = 8.081 ha

c. Curam = 41 ha

Wilayah Kota Jambi memiliki ketinggian dengan kisaran 10-60 m dari permukaan laut. Berdasarkan Kecamatan, sebagian besar wilayah Kecamatan Pasar Jambi, Pelayangan, dan Danau Teluk berada pada ketinggian 1-10 meter dari Permukaan Laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura, Jambi Timur, dan Kota Baru sebagian besar berada pada ketinggian 10-40 meter dari permukaan laut.

Jarak Kota Jambi ke beberapa Kota dan Kabupaten dalam Provinsi Jambi adalah :

1.	Kota Jambi	➔	Muara Bulian	60 Km
2.	Kota Jambi	➔	Muara Bungo	252 Km
3.	Kota Jambi	➔	Bangko	255 Km
4.	Kota Jambi	➔	Sungai Penuh	419 Km
5.	Kota Jambi	➔	Kuala Tungkal	131 Km
6.	Kota Jambi	➔	Sarolangun	179 Km
7.	Kota Jambi	➔	Muara Sabak	129 Km
8.	Kota Jambi	➔	Muara Tebo	206 Km
9.	Kota Jambi	➔	Sengeti	29 Km

Dari sisi iklim, Kota Jambi termasuk beriklim tropis. Curah Hujan di Kota Jambi selama Tahun 2016 beragam antara 70,1 mm sampai 209 mm dengan jumlah hari hujan antara 6 hari sampai 26 hari per bulannya. Kecepatan angin di tiap bulan hampir merata antara 11 knots hingga 25 knots, sedangkan rata-rata kelembaban udara berkisar 98 % - 100 %.

Selama Tahun 2017 rata-rata suhu di Kota Jambi berkisar antara 26,8 °C sampai 27,8 °C dengan suhu maksimum 34,6 °C yang terjadi pada bulan Maret dan Agustus dan suhu minimum 21,2 °C terjadi pada bulan Mei.

C. Jumlah Penduduk Kota Jambi

Penduduk Kota Jambi pada Tahun 2020 adalah berjumlah 618.814 jiwa. Jumlah penduduk tersebar di 11 (sebelas) kecamatan dan yang terbanyak berada pada kecamatan Alam barajo yaitu 106. 868 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berda di kecamatan Danau Teluk yaitu 13.026 jiwa Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

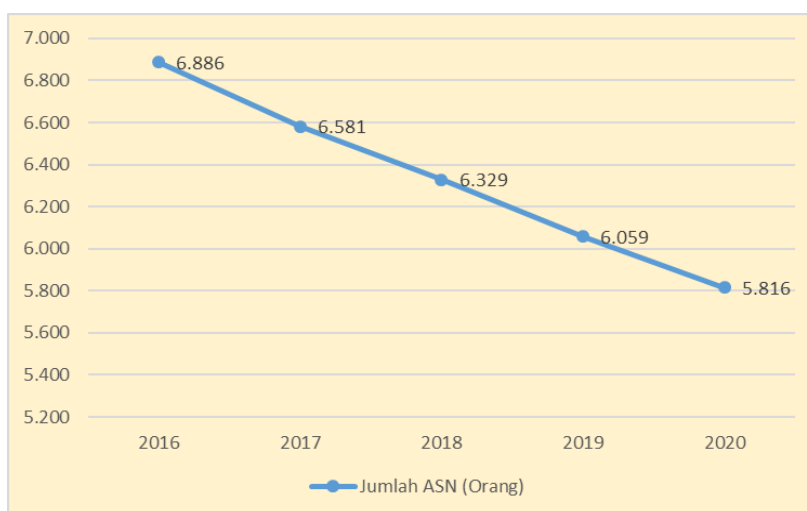
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2020

NO.	KECAMATAN	JUMLAH
1.	TELANAIPURA	50.399
2.	JAMBI SELATAN	59.577
3.	JAMBI TIMUR	68.569
4.	PASAR JAMBI	12.281
5.	PELAYANGAN	13.068
6.	DANAU TELUK	13.026
7.	KOTA BARU	80.746
8.	JELUTUNG	62.123
9.	ALAM BARAJO	106.868
10.	DANAU SIPIN	44.919
11.	PAAL MERAH	106.698
JUMLAH		618.814

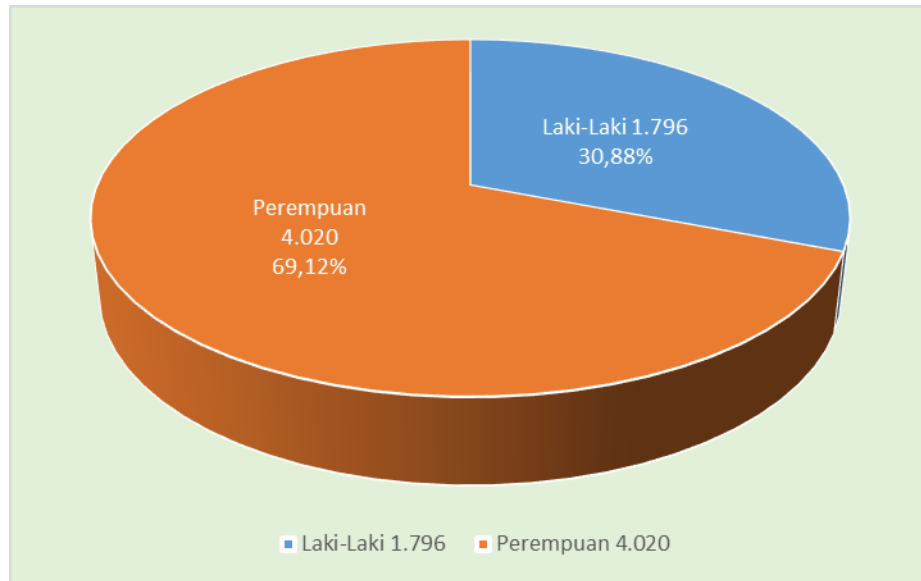
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2020

D. Jumlah Perangkat Daerah Dan Pegawai Di Kota Jambi

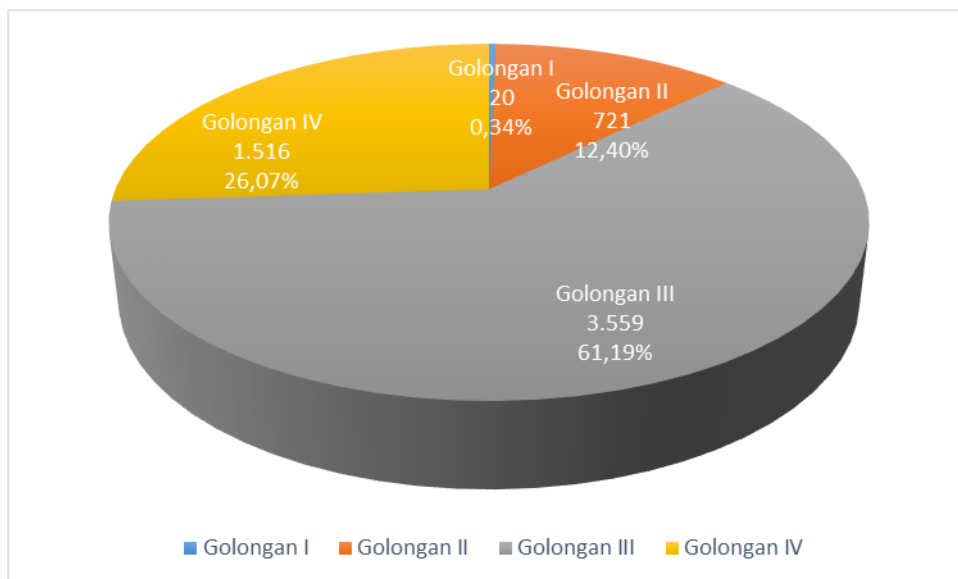
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Jambi berdasarkan data yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi per Desember 2020 adalah sebanyak 5.816 orang. Jumlah ASN sejak tahun 2016 cenderung menurun dikarenakan banyak ASN yang pensiun dan rekrutmen ASN baru tidak lebih banyak dari ASN yang pensiun. Berikut ditampilkan gambar jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2016-2020.



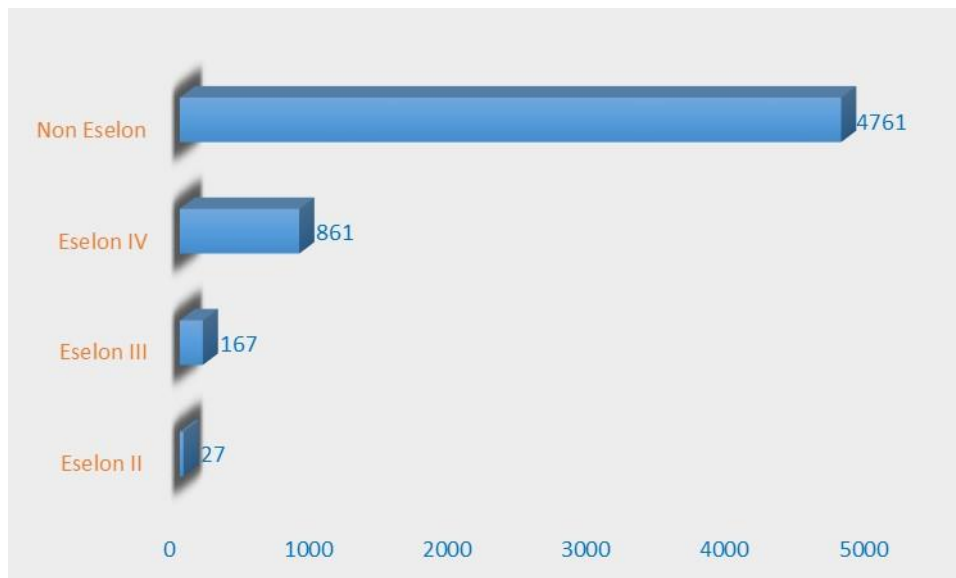
Untuk melihat komposisi ASN laki-laki dan perempuan pada Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



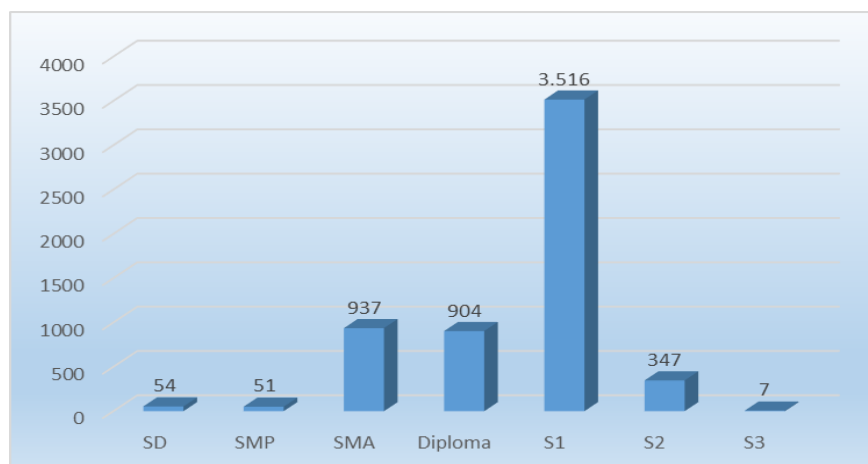
Untuk melihat jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2020 berdasarkan golongan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Untuk melihat jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2020 berdasarkan eselon dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Untuk melihat jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2020 berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



E. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Jambi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sumber-sumber Pendapatan Daerah diperoleh dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Dana Perimbangan;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Target Pendapatan Daerah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.617.658.414.714,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp.1.559.194.791.889,83 (96,39%).

Sampai dengan tahun 2020 pelaksanaan pemungutan Pajak/Retribusi Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Atas dasar ketentuan perundang-undangan di atas dan untuk pelaksanaan/ pengelolaannya di Kota Jambi, maka Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PAJAK / RETRIBUSI	DASAR PEMUNGUTAN (Perda Kota Jambi)
1.	BPHTB	Perda No. 5 Tahun 2019
2.	Pajak Daerah	Perda No. 6 Tahun 2019
3.	Retribusi Jasa Usaha	Perda No. 7 Tahun 2020
4.	Retribusi Jasa Umum	Perda No. 6 Tahun 2020
5.	Retribusi Tertentu	Perda No.13 Tahun 2017

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi berupa optimalisasi penerimaan, dengan memperkuat pelayanan dan proses pemungutan, meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi, efisiensi administrasi dan menekan biaya Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Selanjutnya upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah melalui optimalisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diantaranya sebagai berikut:

- Meningkatkan Pelayanan Perpajakan;
- Meningkatkan Sosialisasi Pajak Daerah;
- Terus Melakukan proses pendataan objek pajak daerah;
- Pemutakhiran Data Wajib Pajak;
- Mengoptimalkan penagihan Piutang Pajak Daerah;
- Penyampaian Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah;
- Melaksanakan tertib administrasi Pengelolaan Pajak Daerah dan administrasi tunggakan Pajak Daerah;
- Mengevaluasi Peraturan-peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sesuai Undang - Undang yang berlaku;
- Melaksanakan Pendampingan oleh KPK dalam rangka upaya penagihan Pajak Daerah;
- Koordinasi lintas Organisasi Perangkat daerah;
- Peningkatan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah. Adapun

- Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari:
 - Hasil Pajak Daerah;
 - Hasil Retribusi Daerah;
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Realisasi penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2020 mencapai Rp.355.505.051.145,93 atau 96,19% dari target penerimaan sebesar Rp.369.594.193.000,00 dan memberikan kontribusi sebesar 22,8% terhadap total Pendapatan Daerah Kota Jambi pada Tahun 2020. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun 2019, yakni sebesar Rp.393.429.795.383,99, maka PAD Tahun 2020 menurun -9,64% atau turun sebesar Rp.37.924.744.238,06. Penurunan realisasi PAD pada tahun 2020 dikarenakan aktivitas ekonomi yang melambat akibat pandemi Covid-19.

Tabel berikut menunjukkan perbandingan target dan realisasi PAD Tahun 2019 dengan Tahun 2020.

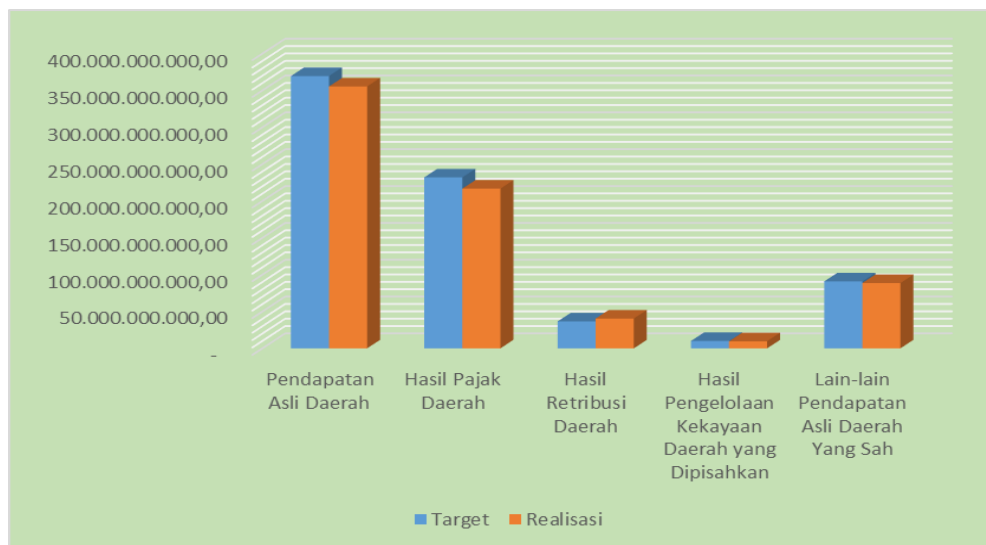
Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2019 dengan TA 2020 (Sebelum audit BPK RI)

No	Uraian	Target 2019 (000)	Realisasi 2019 (000)	% Realisasi	Target 2020 (000)	Realisasi 2020 (000)	% Realisasi
1.	Pajak Daerah	242.090.000	255.915.037,5	105,71	232.060.000	216.815.393,5	93,43
2.	Retribusi Daerah	45.068.647	38.540.603,6	85,52	36.618.000	40.479.596,1	110,55
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.700.000	9.783.144,6	100,86	10.000.000	9.602.267,4	96,02
4.	Lain-lain PAD yang sah	84.885.038	89.191.009,8	105,07	90.916.193	88.607.794,2	97,46
TOTAL		381.743.685	393.429.795,4	103,06	369.594.193	355.505.051,1	96,19

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2021 (Sebelum audit BPK RI)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 target Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 232.060.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.216.815.393.479,00 atau 93,43%. Target Retribusi Daerah sebesar Rp.36.618.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.40.479.596.103,50 atau 110,55%. Target PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.10.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.9.602.267.383,48 atau 96,02%. Sedangkan target PAD yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.90.916.193.000,00 terealisasi sebesar Rp.88.607.794.179,95 atau 97,46%.

Gambar berikut menunjukkan target dan realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi T.A 2020.



Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen PAD terhadap Total PAD Kota Jambi TA 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini



- **Target dan Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan**

Sumber penerimaan daerah dari Dana Perimbangan terdiri dari:

- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak;
- Dana Alokasi Umum (DAU);
- Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pada Tahun 2020 target penerimaan Dana Perimbangan adalah sebesar Rp.1.033.221.759.182,00 dan realisasinya mencapai Rp.1.036.458.974.832,00 atau 100,31%. Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2019 dengan Tahun 2020.

**Perbandingan Target dan Realisasi Dana
Perimbangan TA 2019 dengan TA 2020 (Sebelum
audit BPK RI)**

No	Uraian	Target 2019 (000)	Realisasi 2019 (000)	% Realisasi	Target 2020 (000)	Realisasi 2020 (000)	% Realisa si
1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	137.965.056	132.185.357,7	95,81	87.667.936	99.720.170,9	113,75
2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	757.404.051	757.404.051	100,00	690.724.772	687.484.664	99,53
3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	234.950.785	220.587.624,7	93,89	254.829.051,1	249.254.139,8	97,81
TOTAL		1.130.319.892	1.110.177.033,3	98,22	1.033.221.759,1	1.036.458.974,8	100,31

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2021 (Sebelum audit BPK RI)

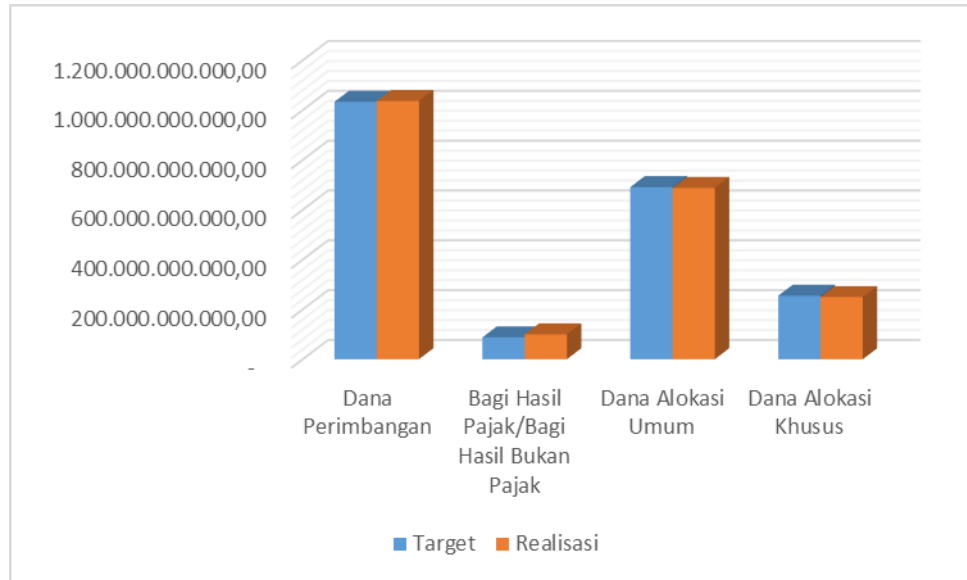
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan PBB yang dikenakan atas bumi dan bangunan, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan.
2. DBH Pajak Penghasilan (DBH PPh) adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan, yaitu: PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan Pasal 29. – PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan. Sedangkan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku kecuali Pajak Penghasilan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (8) Undang- Undang mengenai Pajak Penghasilan.
3. DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.

Penggunaan DBH Pajak bersifat *blockgrant*, yaitu penggunaan dana diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Kecuali untuk DBH CHT paling sedikit 50% digunakan untuk mendanai program/kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai serta pemberantasan barang kena cukai ilegal. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak berasal dari Sumber Daya Alam, seperti dari Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi dan Pertambangan Panas Bumi.

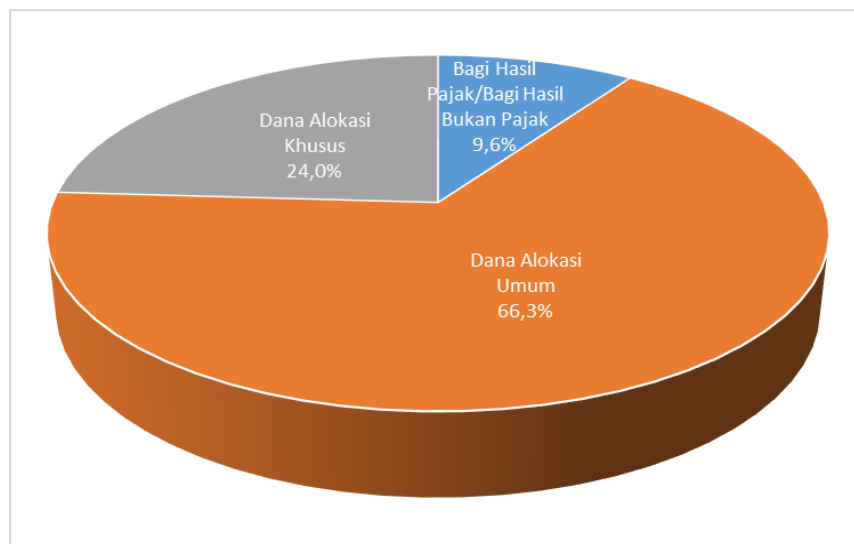
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 target penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak adalah sebesar Rp.87.667.936.000,00 realisasinya mencapai Rp.99.720.170.995,00 atau 113,75%. Target penerimaan dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp.690.724.772.000,00 terealisasi sebesar Rp.687.484.664.000,00 atau 99,53%. Target penerimaan dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.254.829.051.182,00 terealisasi sebesar Rp.249.254.139.837,00 atau 97,81%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Jambi T.A 2020.



Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Jambi T.A 2020

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Dana Perimbangan Kota Jambi T.A 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Persentase Distribusi Realisasi Komponen Dana Perimbangan Terhadap Total Dana Perimbangan Kota Jambi T.A 2020

Target dan Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

- Pendapatan Hibah;
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi;
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;
- Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Target penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp.214.842.462.532,00 terealisasi sebesar Rp.167.230.765.911,90 atau 77,84%. Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2019 dengan Tahun 2020.

**Perbandingan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
TA 2019 dengan TA 2020 (Sebelum audit BPK-RI)**

No	Uraian	Target 2019 (000)	Realisasi 2019 (000)	% Realisa si	Target 2020 (000)	Realisasi 2020 (000)	% Realisasi
1.	Pendapatan Hibah	58.911.800	60.013.627,9	101,87	75.761.804,5	10.745.942,1	14,18
2.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	81.347.485	114.911.044	141,26	97.614.609	115.018.774,8	117,83
3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	11.291.209	11.291.209	100,00	37.746.049	37.746.049	100,00
4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.720.000	9.720.000	100,00	3.720.000	3.720.000	100,00
TOTAL		161.270.494	195.935.881	121,50	214.842.462,5	167.230.765,9	77,84

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2021 (Sebelum audit BPK RI)

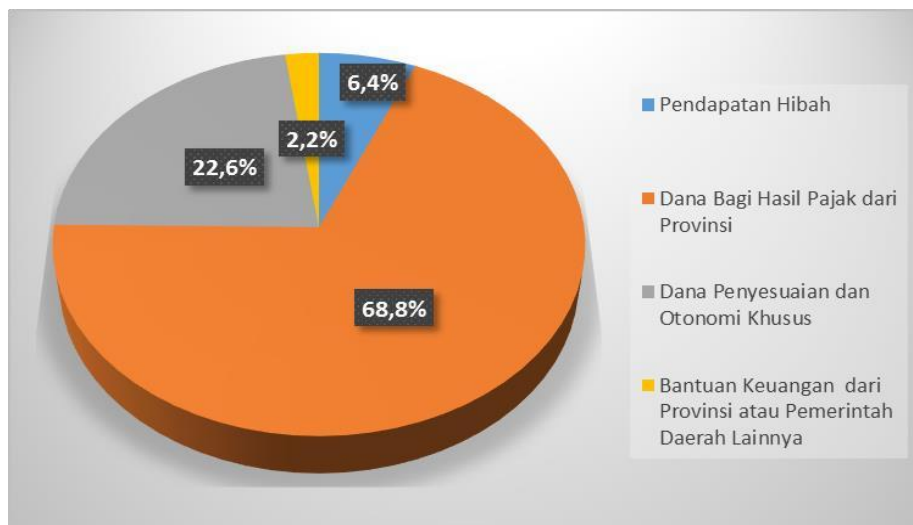
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 target penerimaan Pendapatan Hibah adalah sebesar Rp.75.761.804.500,00 terealisasi sebesar Rp.10.745.942.128,00 atau 14,18%. Target penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp.97.614.609.032,00 terealisasi sebesar Rp.115.018.774.783,90 atau 117,83%. Target penerimaan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp.37.746.049.000,00 terealisasi sebesar Rp.37.746.049.000,00 atau 100%. Target penerimaan dari Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.3.720.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.720.000.000,00 atau 100%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi T.A 2020.



Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi T.A 2020

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi T.A 2020 disajikan pada gambar di bawah ini.



Persentase Distribusi Realisasi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi T.A 2020

Berdasarkan penjelasan mengenai target dan realisasi Pendapatan Daerah menurut jenis penerimaan di atas, maka realisasi total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2020 adalah Rp.1.559.194.791.889,83 atau terealisasi 96,39% dari target sebesar Rp.1.617.658.414.714,00. Secara ringkas target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi TA 2020 (Sebelum audit BPK-RI)

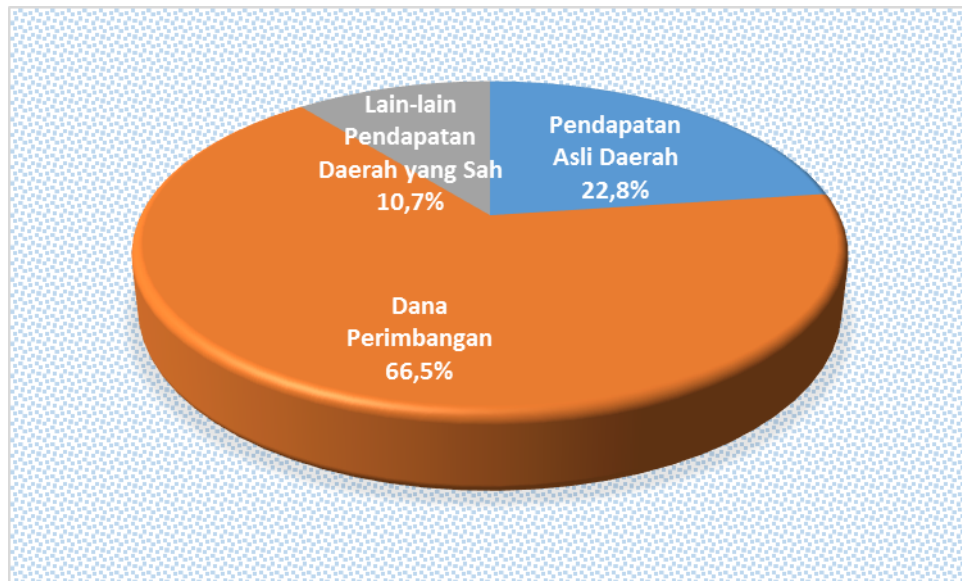
No	Jenis	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	PAD	369.594.193.000,00	355.505.051.145,93	96,19
2	Dana Perimbangan	1.033.221.759.182,00	1.036.458.974.832,00	100,31
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	214.842.462.532,00	167.230.765.911,90	77,84
	Total	1.617.658.414.714,00	1.559.194.791.889,83	96,39

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2021 (Sebelum audit BPK RI)



Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi T. 2020.

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2020

Selanjutnya, jika dilihat dari distribusi realisasi penerimaannya, terlihat bahwa PAD menyumbang 22,8% dari total realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020. Adapun Dana Perimbangan memberikan kontribusi terbesar, yaitu 66,5% dan sisanya sebesar 10,7% adalah penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

- **Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja**

Perwujudan pelayanan publik di daerah tentunya berkorelasi erat dengan kebijakan belanja daerah. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Target Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.828.835.334.125,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp.1.638.511.401.928,45 (89,59%) yang terdiri dari:

- Belanja Tidak Langsung; dan
- Belanja Langsung.

Tabel berikut menunjukkan perbandingan target dan realisasi Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019 dengan Tahun 2020.

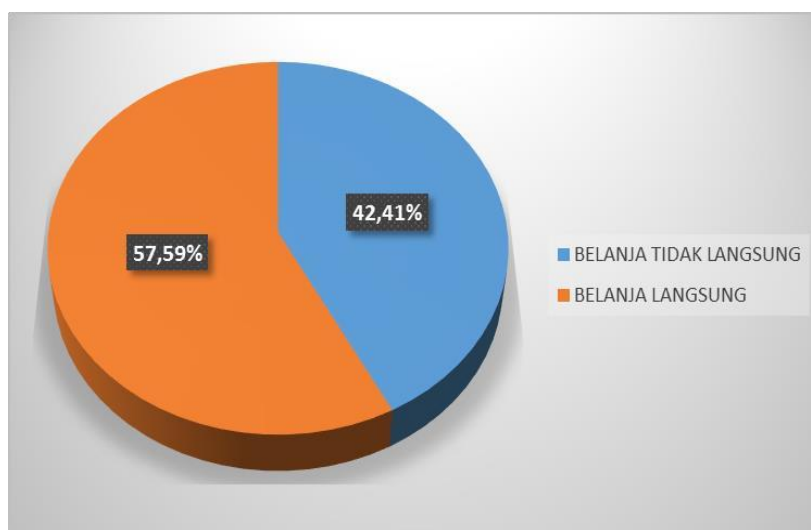
**Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah TA 2019 dengan
TA 2020 (Sebelum audit BPK RI)**

No	Uraian	Target 2019 (000)	Realisasi 2019 (000)	% Realisasi	Target 2020 (000)	Realisasi 2020 (000)	% Realisasi
1.	Belanja Tidak Langsung	806.303.727,6	695.898.324,4	86,31	775.565.398	694.999.439,2	89,61
2.	Belanja Langsung	1.039.954.489,2	965.465.479,7	64,86	1.053.269.936	943.511.962,7	89,58
Total Belanja Daerah		1.846.258.216,9	1.661.363.804,1	89,99	1.828.835.334	1.638.511.401,9	89,59

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2021 (Sebelum audit BPK RI)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 target Belanja Tidak Langsung adalah sebesar Rp.775.565.398.117,00 terealisasi sebesar Rp.694.999.439.218,53 atau 89,61%. Target Belanja Langsung pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.053.269.936.008,00 terealisasi sebesar Rp.943.511.962.709,92 atau 89,58%.

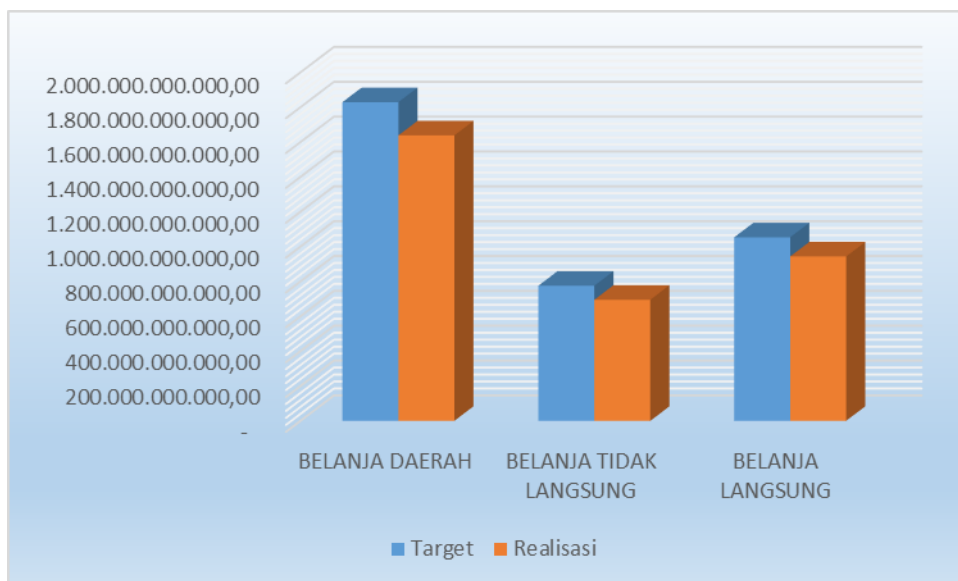
Untuk melihat komposisi besaran antara Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung Pemerintah Kota Jambi TA 2020, seperti pada gambar di bawah ini.



Komposisi Besaran antara Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung Pemerintah Kota Jambi TA 2020

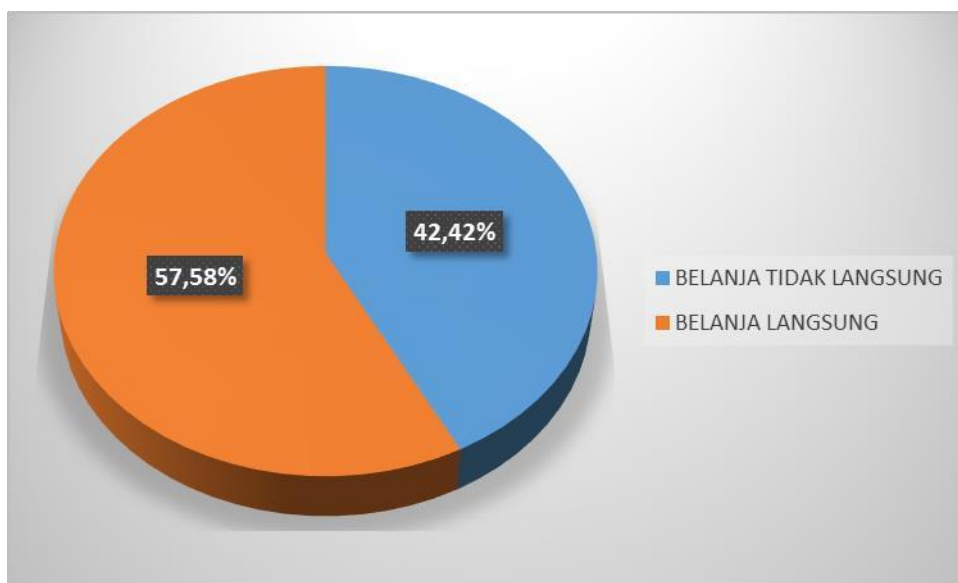
Dari gambar di atas terlihat bahwa persentase besaran Belanja Langsung Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020 sebesar 57,59% jauh berada di atas Belanja Tidak langsung dengan nilai sebesar 42,41%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2020.



Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2020

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2020

- Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.775.565.398.117,00 dengan realisasi sebesar Rp.694.999.439.218,53 atau 89,61% dengan rincian pada tabel berikut.

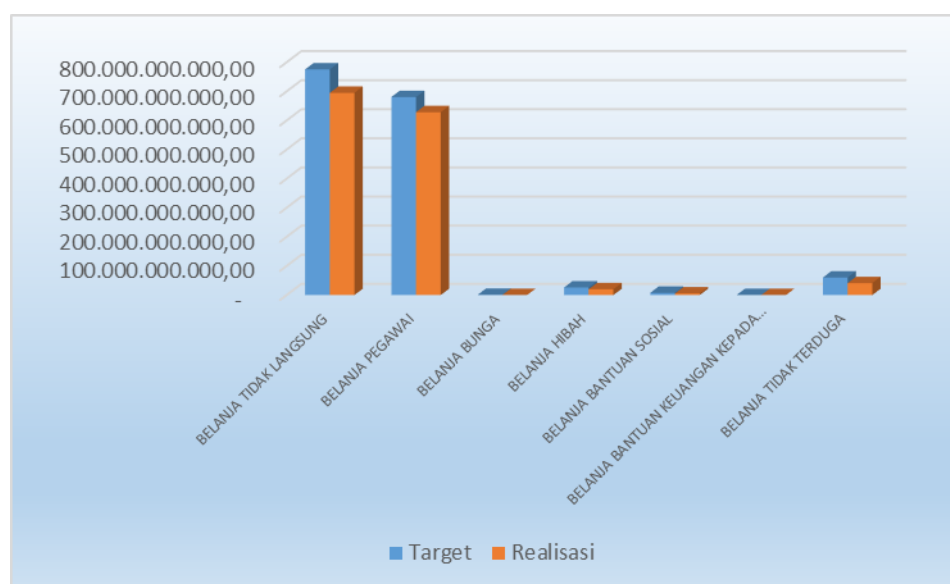
**Perincian Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota
Jambi Tahun Anggaran 2020 (Sebelum audit BPK RI)**

No	Uraian Belanja	Belanja Tidak Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	680.603.063.244,00	628.395.170.421,00	92,33
2.	Belanja Bunga	1.000.000.000,00	-	-
3.	Belanja Hibah	25.985.781.492,00	19.888.786.667,53	76,54
4.	Belanja Bantuan Sosial	7.637.723.000,00	5.671.400.000,00	74,26
5.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa	100.000.000,00	-	-
6.	Belanja Tidak Terduga	60.238.830.381,00	41.044.082.130,00	68,14
Total Belanja Tidak Langsung		775.565.398.117,00	694.999.439.218,53	89,61

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2021 (Sebelum audit BPK RI)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp.680.603.063.244,00 terealisasi sebesar Rp.628.395.170.421,00 atau 92,33%. Anggaran Belanja Bunga sebesar Rp.1.000.000.000,00 tidak terealisasi. Anggaran Belanja Hibah sebesar Rp.25.985.781.492,00 terealisasi sebesar Rp.19.888.786.667,53 atau 76,54%. Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.7.637.723.000,00 terealisasi sebesar Rp.5.671.400.000,00 atau 74,26%. Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa sebesar Rp.100.000.000,00 tidak terealisasi. Anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.60.238.830.381,00 terealisasi sebesar Rp. 41.044.082.130,00 atau 68,14%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Jambi T.A 2020.



Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Jambi T.A 2020

- Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Belanja Langsung pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.1.053.269.936.008,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.943.511.962.709,92 atau 89,58%. Adapun perincian Belanja Langsung pada T.A. 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

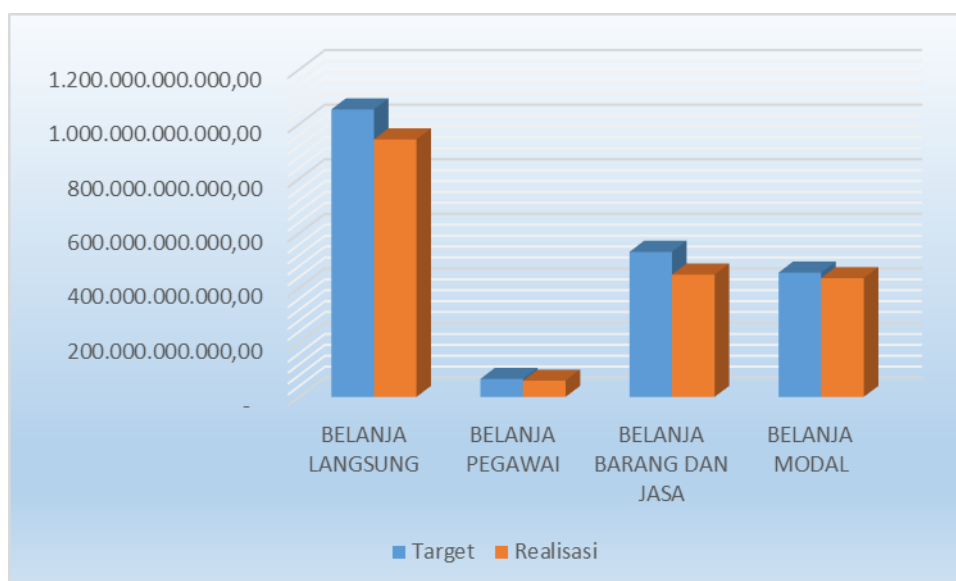
Perincian Belanja Langsung Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020 (Sebelum audit BPK RI)

No	Uraian Belanja	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	66.106.459.381,00	59.787.279.570,00	90,44
2.	Belanja Barang dan Jasa	531.635.283.032,00	448.351.268.568,00	84,33
3.	Belanja Modal	455.528.193.595,00	435.373.414.571,92	95,58
Total Belanja Langsung		1.053.269.936.008,00	943.511.962.709,92	89,58

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2021 (Sebelum audit BPK RI)

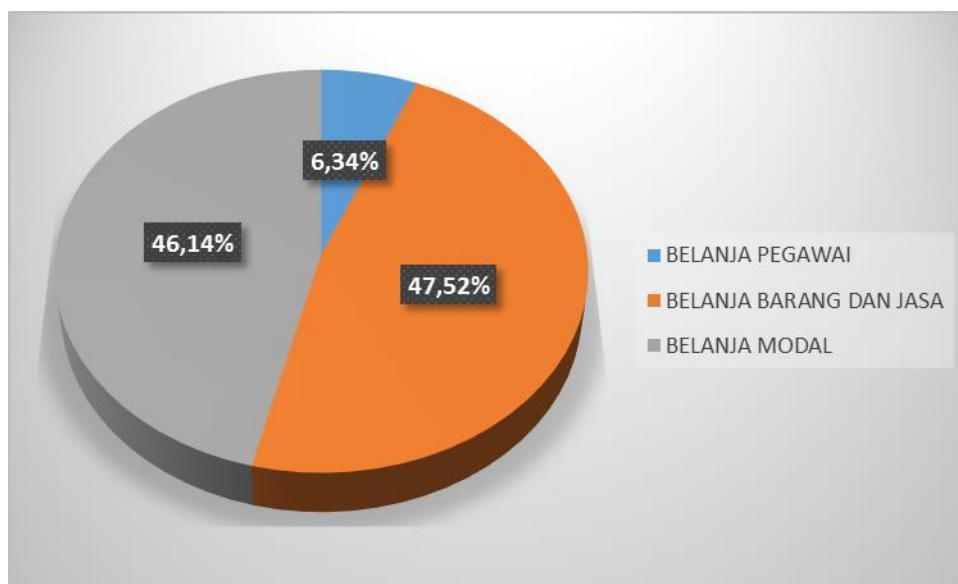
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp.66.106.459.381,00 terealisasi sebesar Rp.59.787.279.570,00 atau 90,44%. Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.531.635.283.032,00 terealisasi sebesar Rp.448.351.268.568,00 atau 84,33%. Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.455.528.193.595,00 terealisasi sebesar Rp.435.373.414.571,92 atau 95,58%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Langsung Kota Jambi T.A 2020.



Target dan Realisasi Belanja Langsung Kota Jambi T.A 2020

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Belanja Langsung Kota Jambi T.A 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Langsung Kota Jambi T.A 2020

- Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan daerah disebut dengan Pembiayaan Netto

Pada tahun 2020, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan tidak ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020 (Sebelum audit BPK RI)

PEMBIAYAAN DAERAH	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020
Penerimaan Pembiayaan Daerah	211.176.919.411,00	162.476.447.416,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	211.176.919.411,00	162.476.447.416,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	0
PEMBIAYAAN NETTO	211.176.919.411,00	162.476.447.416,00
SURPLUS/(DEFISIT)	211.176.919.411,00	(79.316.610.038,62)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		83.159.837.377,38

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2021 (Sebelum audit BPK RI)

1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsip sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang akan dijelaskan lebih lanjut. Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
4. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

B. Visi Dan Misi Kepala Daerah

Visi dapat diartikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi periode 2018-2023, telah ditetapkan Visi Kota Jambi, yaitu:

**“MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS
MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN
PRIMA”**

Batasan konsep yang terdapat dalam visi di atas adalah sebagai berikut:

- **Pusat Perdagangan dan Jasa:** berarti pemusatan/konsentrasi distribusi barang dan jasa skala pelayanan lokal dan regional yang didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda;
- **Berbasis Masyarakat:** berbasis masyarakat merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menela'ah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan;
- **Berakhlak:** Akhlak berarti perilaku, sikap, perbuatan, adat dan sopan santun. Berakhlak berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan;
- **Berbudaya:** Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal dan pikiran yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan ide dan gagasan. Oleh karena itu masyarakat Kota Jambi harus memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan;
- **Pelayanan Prima:** upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi di atas adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;

3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan. Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut:

Misi ke-1 : Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat

berbasis Teknologi Informasi

Untuk menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, Pemerintah Kota Jambi menetapkan sasaran pokok penguatan tata kelola dan birokrasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat meningkat secara maksimal. Pelayanan yang berkualitas diberikan oleh pemerintah dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu bersih, anti korupsi, akuntabel, efektif dan efisien yang berbasis teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat agar dapat mengakses seluruh layanan yang diberikan pemerintah secara cepat, tepat dan aman.

Misi ke-2 : Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat

Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas, keamanan, ketertiban serta kenyamanan bermasyarakat. Penegakan hukum yang dimaksud pada misi ke-2 memiliki tujuan menegakkan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan atau Peraturan Daerah (PERDA). Sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman dalam melakukan aktivitas. Selain itu, dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terutama dalam upaya kewaspadaan dini.

Misi ke-3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan

Pencapaian misi ke-3 merupakan salah satu poin penting dalam pembangunan sebab Pemerintah Kota Jambi telah memiliki target untuk meningkatkan pengelolaan infrastruktur dan utilitas perkotaan sehingga konektivitas dan pemerataan pembangunan dapat tercapai. Selain itu, sesuai dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), lingkungan merupakan salah satu isu vital dalam pembangunan, maka Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi ke-4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan

Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perkotaan diarahkan pada perekonomian inklusif, terutama pada sektor perdagangan dan jasa, khususnya penguatan UMKM dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan serta peluang kerja.

Misi ke-5 : Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan

Kehidupan masyarakat Kota Jambi tercermin dari akses Pendidikan yang berkualitas dengan memberikan perhatian lebih pada siswa tidak mampu. Dan meningkatnya pelayanan kesehatan terutama para ibu, anak, remaja dan lansia. Kualitas Pendidikan dan kesehatan yang tinggi diharapkan akan berdampak pada penurunan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

C. Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Prioritas Pembangunan

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan

Infrastruktur merupakan aspek penting dalam upaya penyediaan ruang kota yang harmonis, baik dalam meningkatkan kenyamanan bagi kehidupan sosial masyarakat, mendorong kemajuan kegiatan perekonomian daerah serta dapat memberikan perlindungan maupun perbaikan/recovery terhadap degradasi lingkungan guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun pembangunan infrastruktur ini dilaksanakan melalui perluasan dan peningkatan kualitas layanan infrastruktur dasar, penataan Kawasan strategis guna mendorong potensi ekonomi, penyediaan ruang publik serta penyediaan/penataan fungsi-fungsi konservasi lingkungan yang di dukung penyediaan sarana dan prasarana perkotaan. Termasuk di dalamnya penyediaan transportasi publik yang didukung jaringan transportasi dalam kota maupun daerah *hinterland* dalam suatu keterpaduan pembangunan dalam perspektif pembangunan regional.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Kota Jambi ialah peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat, karena keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan tetapi yang paling penting adalah keberhasilan pembangunan manusianya, sehingga nantinya dapat terwujud manusia yang kompeten dan mandiri.

Prioritas Pengembangan SDM ini akan menjadi perhatian dari setiap Perangkat Daerah baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Pengembangan yang dilakukan antara lain Pengembangan SDM Aparatur Pemerintah maupun pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja/pelaku UMKM melalui pelatihan kerja yang terencana agar peningkatan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap kerja (attitude) dapat dilakukan. Diharapkan dengan adanya peningkatan kapasitas dasar penduduk akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

3. Penanggulangan Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan bukan hanya merupakan masalah ekonomi semata, akan tetapi juga merupakan masalah sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, implikasi permasalahan kemiskinan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia secara keseluruhan, yang pada akhirnya akan menentukan kelangsungan pembangunan kualitas manusia itu sendiri yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dalam kaitan proses perkembangan dinamika kehidupan masyarakat, maka masalah kemiskinan dipandang sebagai masalah yang sangat dinamis, sehingga membutuhkan peran institusi, program serta metode pendekatan yang mampu menjawab permasalahan kemiskinan.

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam implementasi penanggulangan kemiskinan yaitu:

- a) Masih lemahnya koordinasi terutama dalam hal: pendataan, pendanaan, dan kelembagaan;
- b) Lemahnya koordinasi antar program-program penanggulangan kemiskinan antara instansi pemerintah pusat dan daerah;
- c) Lemahnya integrasi program pada tahap perencanaan, sinkronisasi program pada tahap pelaksanaan, dan sinergi antar pelaku (pemerintah, dunia usaha, masyarakat madani);
- d) Belum optimalnya kelembagaan di pemerintah, dunia usaha, LSM, dan masyarakat madani dalam bermitra dan bekerjasama dalam penanggulangan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja

Dengan dimensinya yang luas dan kompleks, kemiskinan perlu ditangani secara komprehensif dan sistemik. Pemecahan masalah kemiskinan juga tidak lagi dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui kebijakan yang terpusat dan berjangka pendek, melainkan memerlukan pendekatan yang terpadu, terencana, berkesinambungan, dan menuntut keterlibatan berbagai pihak.

4. Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah

Apabila melihat tren dan menganalisis berbagai sektor ekonomi, maka sektor pariwisata menjadi sektor yang paling memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai andalan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Setiap tahun performa pariwisata Indonesia terus menanjak, sektor ini terus tumbuh dan bergerak lincah dalam peningkatan ekonomi Indonesia.

Potensi pengembangan pariwisata di Kota Jambi juga telah dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal. Berbagai pembangunan fisik maupun non fisik dilakukan dalam rangka pengembangan pariwisata di Kota Jambi seperti pengembangan Danau Sipin sebagai kawasan wisata terpadu, perbaikan infrastruktur publik, pembangunan berbagai fasilitas umum dan juga perbaikan sistem pelayanan publik yang pada akhirnya akan mengakselerasi aktivitas ekonomi masyarakat.

Konsep pengembangan pariwisata di Kota Jambi kedepannya adalah pengembangan pariwisata berbasis penataan kawasan, diantaranya adalah penataan kawasan Pasar Kota Jambi, pembangunan kawasan wisata Jambi Kota Seberang yang memiliki potensi wisata alam dan juga wisata budaya.

Selain sebagai ibu kota Provinsi Jambi, Kota Jambi juga merupakan daerah strategis sebagai pintu masuk dan perlintasan ke daerah lainnya, baik perlintasan antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi maupun perlintasan antar provinsi. Hal ini tentu juga akan memberi banyak manfaat bagi pengembangan pariwisata di Kota Jambi, terutama bidang perhotelan, restoran, transportasi dan penyelenggaraan aktivitas MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*).

Ketika promosi dan akomodasi transportasi berjalan seirama, tentu diperlukan perhatian yang cukup intensif terhadap kualitas objek wisata dan keramahan tuan rumah itu sendiri. Inovasi paket wisata dan berbagai kreativitas lainnya juga harus digerakkan berkesinambungan. Selain itu, juga dibutuhkan sinergitas semua stakholder terkait dalam pengembangan pariwisata di Kota Jambi. Hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah peran masyarakat pengguna teknologi untuk memaksimalkan promosi sektor pariwisata di Kota Jambi. Kombinasi apik antara perkembangan teknologi, pariwisata, serta keramahan budaya akan menjadi nilai tambah bagi pengembangan aktivitaskepariwisataan.

Apabila aktivitas kepariwisataan mampu dikelola dengan baik dan diorganisasi dengan manajemen yang sehat, maka hal ini tentu akan meningkatkan promosi daerah Kota Jambi di level nasional maupun internasional. Dengan demikian, peningkatan investasi di Kota Jambi pun juga akan tumbuh, dan selanjutnya akan berdampak pada peningkatan lapangan usaha dan pengurangan pengangguran. Muaranya tentu adalah perbaikan struktur dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.

Janji Politik Kepala Daerah

1. Peningkatan Implementasi IT Dalam Pengelolaan Perkotaan dan Pemerintahan
2. Jambi Cerdas
3. Jambi Bugar
4. Kota Layak Anak

5. Kegiatan Khusus Lansia
6. Perluasan Layanan Kesehatan 119
7. Peningkatan Jumlah dan Kualitas PKM Rawat Inap
8. Pelayanan Prima Perizinan
9. Peningkatan Frekuensi Job Fair
10. Kepastian Hukum
11. Peningkatan SDM dan Prasarana Bagi Pelaku IKM/UMKM
12. Laporan Keuangan Yang Akuntabel
13. Peningkatan Rekrutmen Guru Agama
14. Peningkatan Akses Dan Responsibilitas Terhadap Keluhan Masyarakat Berbasis IT
15. Peningkatan Destinasi Wisata Serta Prasarananya
16. Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Pelayanan Publik
17. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Dan Swasta

D. Kegiatan Pembangunan Daerah

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

2. Program Prioritas Pembangunan

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan

Infrastruktur merupakan aspek penting dalam upaya penyediaan ruang kota yang harmonis, baik dalam meningkatkan kenyamanan bagi kehidupan sosial masyarakat, mendorong kemajuan kegiatan perekonomian daerah serta dapat memberikan perlindungan maupun perbaikan/recovery terhadap degradasi lingkungan guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun pembangunan infrastruktur ini dilaksanakan melalui perluasan dan peningkatan kualitas layanan infrastruktur dasar, penataan Kawasan strategis guna mendorong potensi ekonomi, penyediaan ruang publik serta penyediaan/penataan fungsi-fungsi konservasi lingkungan yang di dukung penyediaan sarana dan prasarana perkotaan. Termasuk di dalamnya penyediaan transportasi publik yang didukung jaringan transportasi dalam kota maupun daerah *hinterland* dalam suatu keterpaduan pembangunan dalam perspektif pembangunan regional.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Kota Jambi ialah peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat, karena keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan tetapi yang paling penting adalah keberhasilan pembangunan manusianya, sehingga nantinya dapat terwujud manusia yang kompeten dan mandiri.

Prioritas Pengembangan SDM ini akan menjadi perhatian dari setiap Perangkat Daerah baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Pengembangan yang dilakukan antara lain Pengembangan SDM Aparatur Pemerintah maupun pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja/pelaku UMKM melalui pelatihan kerja yang terencana agar peningkatan pengetahuan (knowledge),

keterampilan (skill), dan sikap kerja (attitude) dapat dilakukan. Diharapkan dengan adanya peningkatan kapasitas dasar penduduk akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

3. Penanggulangan Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan bukan hanya merupakan masalah ekonomi semata, akan tetapi juga merupakan masalah sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, implikasi permasalahan kemiskinan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia secara keseluruhan, yang pada akhirnya akan menentukan kelangsungan pembangunan kualitas manusia itu sendiri yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dalam kaitan proses perkembangan dinamika kehidupan masyarakat, maka masalah kemiskinan dipandang sebagai masalah yang sangat dinamis, sehingga membutuhkan peran institusi, program serta metode pendekatan yang mampu menjawab permasalahan kemiskinan.

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam implementasi penanggulangan kemiskinan yaitu:

- a) Masih lemahnya koordinasi terutama dalam hal: pendataan, pendanaan, dan kelembagaan;
- b) Lemahnya koordinasi antar program-program penanggulangan kemiskinan antara instansi pemerintah pusat dan daerah;
- c) Lemahnya integrasi program pada tahap perencanaan, sinkronisasi program pada tahap pelaksanaan, dan sinergi antar pelaku (pemerintah, dunia usaha, masyarakat madani);
- d) Belum optimalnya kelembagaan di pemerintah, dunia usaha, LSM, dan masyarakat madani dalam bermitra dan bekerjasama dalam penanggulangan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja

Dengan dimensinya yang luas dan kompleks, kemiskinan perlu ditangani secara komprehensif dan sistemik. Pemecahan masalah kemiskinan juga tidak lagi dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui kebijakan yang terpusat dan berjangka pendek, melainkan memerlukan pendekatan yang terpadu, terencana, berkesinambungan, dan menuntut keterlibatan berbagai pihak.

4. Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah

Apabila melihat tren dan menganalisis berbagai sektor ekonomi, maka sektor pariwisata menjadi sektor yang paling memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai andalan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Setiap tahun performa pariwisata Indonesia terus menanjak, sektor ini terus tumbuh dan bergerak lincah dalam peningkatan ekonomi Indonesia

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	78,26	78,37	0,14
2	Angka Kemiskinan	8,12	8,27	1,85
3	Angka Pengangguran	6,72	10,49	56,10
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,33	-3,28	-161,64
5	Pendapatan Per kapita	51.023,76	*51.023,76	-
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,33	*0,33	-

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	247	Dinas Pendidikan	
2		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima	460	Dinas Pendidikan	

		perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			
3		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	-	Dinas Pendidikan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
4		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	1293	Dinas Pendidikan	
5		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	894	Dinas Pendidikan	
6		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	576	Dinas Pendidikan	
7		Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	302	Dinas Pendidikan	
8		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	206	Dinas Pendidikan	
9		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	-	Dinas Pendidikan	

		yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			
10		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	Dinas Pendidikan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
11		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	724	Dinas Pendidikan	
12		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	709	Dinas Pendidikan	
13		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	3476	Dinas Pendidikan	
14		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1944	Dinas Pendidikan	
15		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3110	Dinas Pendidikan	
16		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1794	Dinas Pendidikan	
17		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1441	Dinas Pendidikan	

		(Negeri dan Swasta			
18		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	615	Dinas Pendidikan	
19		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	919	Dinas Pendidikan	
20		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	518	Dinas Pendidikan	
21		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2812	Dinas Pendidikan	
22		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1692	Dinas Pendidikan	
23		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	163	Dinas Pendidikan	
24		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau	70	Dinas Pendidikan	

		S1,sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
25		Jumlah tenaga penunjan lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	756	Dinas Pendidikan	
26		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	398	Dinas Pendidikan	
27		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	206	Dinas Pendidikan	
28		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	Dinas Pendidikan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
29		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	Dinas Pendidikan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
30		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	724	Dinas Pendidikan	
31		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama Yang menerima pembebasan biaya pendidikan	709	Dinas Pendidikan	
32		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	3476	Dinas Pendidikan	

33	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1944	Dinas Pendidikan	
34	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3100	Dinas Pendidikan	
35	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1794	Dinas Pendidikan	
36	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1441	Dinas Pendidikan	
37	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	615	Dinas Pendidikan	
38	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	919	Dinas Pendidikan	
39	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	518	Dinas Pendidikan	
40	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2812	Dinas Pendidikan	
41	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1692	Dinas Pendidikan	
42	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah	163	Dinas Pendidikan	

		dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1 sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
43		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	70	Dinas Pendidikan	
44		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	756	Dinas Pendidikan	
45		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	398	Dinas Pendidikan	
46		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	14	Dinas Pendidikan	
47		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	Dinas Pendidikan	
48		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya	5	Dinas Pendidikan	

		Pendidikan			
49		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	104	Dinas Pendidikan	
50		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	90	Dinas Pendidikan	
51		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	77	Dinas Pendidikan	
52		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala Sekolah	163	Dinas Pendidikan	
53		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	8	Dinas Pendidikan	
1	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	15	Dinas Kesehatan	
2		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	3	Dinas Kesehatan	
3		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	-	-	
4		Jumlah SDM	-	-	

		kesehatan untuk pelayanan antenatal			
5		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	-	-	
6		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	-	-	
7		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	-	-	
8		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	-	-	
9		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	-	-	
10		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	-	-	
11		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	-	-	
12		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	-	-	
13		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	-	-	
14		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	

15	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	-	-	
16	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	
17	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	-	-	
18	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	
19	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	-	-	
20	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuaistandar	-	-	
21	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	-	-	
22	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuaistandar	-	-	
23	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	-	-	
24	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuaistandar	-	-	
25	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	-	-	
26	Jumlah SDM	-	-	

		kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			
1	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
2		Panjang sungai dikawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangankabupaten/kota (m)	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
3		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
4		Panjang pantai dikawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
5		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangankabupaten/kota	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
6		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan

7		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	7170	Dinas PUPR	
8		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
9		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangankabupaten/kota (m)	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
10		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasierosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
11		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
12		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangankabupaten/kota	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
13		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangankabupaten/kota	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan

		n/kota			
14		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPR	
15		Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	36.97%	Dinas PUPR	
16		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	13.72%	Dinas PUPR	
17		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
18		Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	ada	Dinas PUPR	
19		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADAKab/Kota	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
20		Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	1 BUMD Tirta Mayang	Dinas PUPR	
21		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
22		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat

		Pemerintah daerah lain			keterangan
23		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
24		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	2684	Dinas PUPR	
25		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
26		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	939	Dinas PUPR	
27		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	1004	Dinas PUPR	
28		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	1004	Dinas PUPR	
29		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD Saksas dasar	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan

30		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD Sakses aman	1.48%	Dinas PUPR	
31		Kinerja penyediaan pelayanan SPALDT akses aman	1.45%	Dinas PUPR	
32		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	1.48%	Dinas PUPR	
33		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	9.09%	Dinas PUPR	
34		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0.03%	Dinas PUPR	
35		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	100.00%	Dinas PUPR	
36		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0.51%	Dinas PUPR	
37		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang baik fungsi	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
38		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
39		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Perda Kota Jambi no 3 Tahun 2015	Dinas PUPR	
40		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat

					keterangan
41		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	-	Dinas PUPR	
42		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
43		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	377	Dinas PUPR	
44		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	258	Dinas PUPR	
45		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	510,452 Km	Dinas PUPR	
46		Panjang jalan yang dibangun	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
47		Panjang jembatan yg dibangun	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
48		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	10633	Dinas PUPR	
49		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	12	Dinas PUPR	

50		Panjang jalan yang direkonstruksiataudirehabilitasi	13269	Dinas PUPR	
51		Panjang jembatan yang direhabilitasi	266	Dinas PUPR	
52		Panjang jalan yangdipelihara	3333	Dinas PUPR	
53		Panjang jembatan yang dipelihara	8	Dinas PUPR	
54		Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	3	Dinas PUPR	
55		Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayahkabupaten/kota	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
56		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	77	Dinas PUPR	
57		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
58		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi diwilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBDKab/Kota	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan

59		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
60		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksidi wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
61		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai - kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
62		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksikabupaten/kota	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan

63	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analiskonstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yangm embidangijasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
64	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikan pelatihan operator dan teknisi/analisis	77	Dinas PUPR	
65	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
66	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayahkabupaten/kot a	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
67	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha danTDUP yang disetujui	212	Dinas PUPR	
68	Tersedianya data dan informasi hasil	-	Dinas PUPR	Data tidak ada,

		pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			dilampirkan surat keterangan
69		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
70		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
71		Jumlah badan usahayang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	212	Dinas PUPR	
72		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
73		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
74		Jumlah badan	-	Dinas PUPR	Data tidak

		usahayang mendapatkanpembina andiwilayahKab/Kota			ada, dilampirka n surat keterangan n
75		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha danTDUP yang disetujui	212	Dinas PUPR	
76		Jumlah pengawasanterkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenanganpengawas annya	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirka n surat keterangan n
77		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirka n surat keterangan n
78		Jumlahpengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas PUPR	Data tidak ada, dilampirka n surat keterangan n
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	-	Dinas PRKP	Data tidak ada, dilampirka n surat keterangan n

2		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	-	Dinas PRKP	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
3		Jumlah RT, KK dan Jiwakorban yang rumahnya terkena bencana alam	-	Dinas PRKP	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
4		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	-	Dinas PRKP	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
5		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	-	Dinas PRKP	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
6		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	-	Dinas PRKP	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
7		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	-	Dinas PRKP	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
8		Jumlah RT, KK dan Jiwakorban bencana yang terfasilitasi	-	Dinas PRKP	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
9		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	-	Dinas PRKP	Data tidak ada, dilampirkan surat

					keterangan
10		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	Dinas PRKP	
11		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Dinas PRKP	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
12		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	Dinas PRKP	
13		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Dinas PRKP	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
14		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Dinas PRKP	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
15		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	-	Dinas PRKP	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan

					n
16		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	76,52 ha	Dinas PRKP	
17		Jumlah unit peningkatankualitas RTLH	731 unit	Dinas PRKP	
18		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	4.12 ha	Dinas PRKP	
19		Jumlah rumah di kab/kota	152.919 unit	Dinas PRKP	
20		Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	731 unit	Dinas PRKP	
21		Jumlah rumah tidak layak huni	6176 unit	Dinas PRKP	
22		Jumlah rumah yang tidak dihuni	6176 unit	Dinas PRKP	
23		Rasio rumah dan KK	83.52%	Dinas PRKP	
24		Jumlah rumah pembangunan baru	-	Dinas PRKP	
25		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	31 Perusahaan	Dinas PRKP	
26		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	-	Dinas PRKP	
27		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	126 Perusahaan	Dinas PRKP	
28		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	-	Dinas PRKP	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan

29		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	126 Perusahaan	Dinas PRKP	
30		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	-	Dinas PRKP	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
31		Jumlah pengembangan tersertifikasi	-	Dinas PRKP	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
32		Jumlah pengembangan teregistrasi	-	Dinas PRKP	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
33		Jumlah pengembangan mendapat penyuluhan atau pelatihan	-	Dinas PRKP	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
1	Trantimbumlinmas (POLPP)	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	109	Satpol PP	
2		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	224	Satpol PP	
3		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	23	Satpol PP	
4		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	7	Satpol PP	
5		Tersedianya SOP dalam penegakan	6	Satpol PP	

		Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum			
6		Tersedianyasarana prasarana minimal	408	Satpol PP	
1	Trantibumlinmas (DAMKAR)	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100.00%	Disdamkar	
2		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	72.84 %	Disdamkar	
3		Presentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	-	Disdamkar	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
4		Persentase penyelesaian dokumen renkon sampai dinyatakan sah/legal	-	Disdamkar	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
5		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0.65 %	Disdamkar	
6		Presentase warga negara yang ikut pelatihan	0.64 %	Disdamkar	
6		presentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan	100.00%	Disdamkar	

		bencana			
7		Presentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100.00%	Disdamkar	
8		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap staus KLB	-	Disdamkar	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
9		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jamb untuk setiap status darurat bencana	-	Disdamkar	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
10		presentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	73.53 %	Disdamkar	
11		presentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100.00%	Disdamkar	
12		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	12	Disdamkar	
13		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada	Disdamkar	
14		Tersedianya aparatatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan se	Ada	Disdamkar	

		cara bergantian (shift) di kantor kecamatan			
15		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Tidak ada	Disdamkar	
16		Jumlah dan jenis sarana prasaranapemadaman, penyelamatan dan evakuasi	74	Disdamkar	
17		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	206	Disdamkar	
18		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	132	Disdamkar	
19		Jumlah peningkatan kapasitas ap aratur pemadam kebakaran	4	Disdamkar	
1	trantibumlinmas (SOSIAL)	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1	Dinas Sosial	

2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	3000 Jiwa	Dinas Sosial	
3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	3 Tim	Dinas Sosial	
4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	2016 Jiwa	Dinas Sosial	
5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	3 Unit	Dinas Sosial	
6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	275 Jiwa	Dinas Sosial	
7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	2 Gedung	Dinas Sosial	
8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	0	Dinas Sosial	
9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat	24 Jiwa	Dinas Sosial	

		bantu			
10		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	1 Buah	Dinas Sosial	
11		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	331 Jiwa	Dinas Sosial	
12		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usiate rlanter dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	331 Jiwa	Dinas Sosial	
13		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	1 Orang	Dinas Sosial	
14		Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	2 Jiwa	Dinas Sosial	
15		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	115 Jiwa	Dinas Sosial	
16		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan	1000 Jiwa	Dinas Sosial	

		masyarakat			
17		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	-	Dinas Sosial	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
18		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	-	Dinas Sosial	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
19		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	2 Jiwa	Dinas Sosial	
20		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	2 Jiwa	Dinas Sosial	
21		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang Dirujuk	7	Dinas Sosial	
22		Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	861 Jiwa	Dinas Sosial	
23		Jumlah korban bencana	-	Dinas Sosial	Data tidak ada, dilampirkan

		yang menerima paket sandang			n surat keterangan
24		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	-	Dinas Sosial	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
25		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	-	Dinas Sosial	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
26		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanandukungan psikososial	-	Dinas Sosial	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
27		Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/ata relawan sosial yang tersedia	2 Jiwa	Dinas Sosial	
1	Ketenagakerjaan	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1 Dokumen	Dinas TTK dan UKM	
2		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	-	Dinas TTK dan UKM	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
3		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	-	Dinas TTK dan UKM	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
4		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	22.22 %	Dinas TTK dan UKM	
5		presentase instruktur bersertifikat	35 %	Dinas TTK dan UKM	

		kompetensi			
6		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	92.31 %	Dinas TKK dan UKM	
7		Persentase LPK yang memiliki perizinan	11.54 %	Dinas TKK dan UKM	
8		Jumlah penggaur yang dilatih	130	Dinas TKK dan UKM	
9		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100.00%	Dinas TKK dan UKM	
10		Persentase penyerapan lulusan	52.31 %	Dinas TKK dan UKM	
11		Lulusan bersertifikat kompetensi	100.00%	Dinas TKK dan UKM	
12		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan Pelatihan	100.00%	Dinas TKK dan UKM	
13		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	7	Dinas TKK dan UKM	
14		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0.21%	Dinas TKK dan UKM	
15		Data tingkat produktivitas total	-	Dinas TKK dan UKM	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
16		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	14.79%	Dinas TKK dan UKM	
17		Persentase	151.61 %	Dinas TKK dan	

		perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)		UKM	
18		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	116	Dinas TKK dan UKM	
19		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	12.20%	Dinas TKK dan UKM	
20		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	317.21 %	Dinas TKK dan UKM	
21		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0.44 %	Dinas TKK dan UKM	
22		Jumlah mogok kerja	-	Dinas TKK dan UKM	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
23		Jumlah penutupan perusahaan	2	Dinas TKK dan UKM	
24		Jumlah perselisihan kepentingan	1	Dinas TKK dan UKM	
25		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	-	Dinas TKK dan UKM	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan

26	Jumlah perselisihan PHK	72	Dinas TKK dan UKM
27	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	121	Dinas TKK dan UKM
28	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	25	Dinas TKK dan UKM
29	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	2	Dinas TKK dan UKM
30	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	61.84%	Dinas TKK dan UKM
31	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	760	Dinas TKK dan UKM
32	Jumlah pencari kerjayang terdaftar di kab/kota	3775	Dinas TKK dan UKM
33	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	22	Dinas TKK dan UKM
34	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	10	Dinas TKK dan UKM
36	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	2	Dinas TKK dan UKM
37	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	1	Dinas TKK dan UKM

		(LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota			
38		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	7	Dinas TKK dan UKM	
39		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	1	Dinas TKK dan UKM	
40		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	100.00 %	Dinas TKK dan UKM	
41		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	7	Dinas TKK dan UKM	
42		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	-	Dinas TKK dan UKM	
43		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	100.00 %	Dinas TKK dan UKM	
44		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	-	Dinas TKK dan UKM	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
45		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap	-	Dinas TKK dan UKM	Data tidak ada,

		(LTSA) yang dibentuk			dilampirkan surat keterangan
1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	presentasi fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	8.26 %	Dinas TTK dan UKM	
2		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100.00% %	Dinas TTK dan UKM	
3		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	45.87 %	Dinas TTK dan UKM	
4		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	22.94 %	Dinas TTK dan UKM	
5		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	35.32 %	Dinas TTK dan UKM	
6		Persentase jumlah	4.25 %	Dinas TTK dan	

		anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		UKM	
7		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	34	Dinas TKK dan UKM	
8		presentasi fasilitasi penerbitan sertifikat nomor induk koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	26.61 %	Dinas TKK dan UKM	
9		presentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	15.60 %	Dinas TKK dan UKM	
10		presentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	5.96 %	Dinas TKK dan UKM	
11		presentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	11.47 %	Dinas TKK dan UKM	
12		presentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan	18.35 %	Dinas TKK dan UKM	

		wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
13		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	4.75 %	Dinas TKK dan UKM	
14		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	-	Dinas TKK dan UKM	
15		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	100.00 %	Dinas TKK dan UKM	
16		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0.75 %	Dinas TKK dan UKM	
17		presentae jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	16.21 %	Dinas TKK dan UKM	
18		rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	16.21 %	Dinas TKK dan UKM	
19		persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	16.21 %	Dinas TKK dan UKM	
1	DPMPPA	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	18	Dinas PMPPA	
2		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	25	Dinas PMPPA	

3		jumlah medai massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas ppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	3	Dinas PMPPA	
4		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	24.31 %	Dinas PMPPA	
5		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	24.31 %	Dinas PMPPA	
6		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	6	Dinas PMPPA	
7		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	-	Dinas PMPPA	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
8		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kotayang mendapatkan pelatihan	9	Dinas PMPPA	
9		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	73	Dinas PMPPA	
10		Jumlah lembaglayanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	6	Dinas PMPPA	

11		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	-	Dinas PMPPA	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
12		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	Dinas PMPPA	
13		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	3	Dinas PMPPA	
14		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100.00%	Dinas PMPPA	
Pertanian					
1		Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	12 Item (sarana) dan 14 prasarana	Dinas Pertanian dan Pangan	
2		Prasarana pertanian yang digunakan	14 item	Dinas Pertanian dan Pangan	
3		Penerbitan izin usaha pertanian	-	Dinas Pertanian dan Pangan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
4		Persentase prasarana yang digunakan	100.00 %	Dinas Pertanian dan Pangan	

5		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	71.43 %	Dinas Pertanian dan Pangan	
6		presentse fasilitasi penanggulangan bencana	100.00 %	Dinas Pertanian dan Pangan	
Pangan					
1		tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	-	Dinas Pertanian dan Pangan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
2		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	-	Dinas Pertanian dan Pangan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
3		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	-	Dinas Pertanian dan Pangan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
4		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergiziseimbang	6 KWT dalam 11 Kecamatan	Dinas Pertanian dan Pangan	
5		Tersedianya petaketahanan dan kerentanan pangan	25 eksmplar 3 peta	Dinas Pertanian dan Pangan	
6		Tertanganinya kerawanan pangan	4 Kelurahan	Dinas Pertanian dan Pangan	
7		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	4.695 Kg (4,7 Ton)	Dinas Pertanian dan Pangan	

8		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	80 sampel	Dinas Pertanian dan Pangan	
Perikanan					
1		Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	45 orang	Dinas Pertanian dan Pangan	
2		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	-	Dinas Pertanian dan Pangan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
3		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	-	Dinas Pertanian dan Pangan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
4		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	20 Kelompok	Dinas Pertanian dan Pangan	
5		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	79.930.670 ekor	Dinas Pertanian dan Pangan	
Pertanahan					
1		SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota	-	Data Nihil Dilampirkan dengan Surat Keterangan	
2		SK walikota tentang penetapan tanah	-	Data Nihil Dilampirkan	

		obyek landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum/absentee dan daftar subyek		dengan Surat Keterangan	
3		SK Walikota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee	-	Data Nihil Dilampirkan dengan Surat Keterangan	
4		Dokumen izin membuka tanah	-	Data Nihil Dilampirkan dengan Surat Keterangan	
5		Dokumen perencanaan penggunaan tanah kabupaten/kota	-	Data Nihil Dilampirkan dengan Surat Keterangan	
1	Lingkungan hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH)	a. 39.60 b. 84,51 c. 44.82	Dinas Lingkungan Hidup	
2		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. 95,03415, 2. 58.82, 3. Tidak ada TPST	Dinas Lingkungan Hidup	
3		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	86.87 %	Dinas Lingkungan Hidup	
4		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	1.16 %	Dinas Lingkungan Hidup	

5		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	-	Dinas Lingkungan Hidup	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
6		terfasilitasnya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	-	Dinas Lingkungan Hidup	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
7		Jumlah kemasyarakatan yang diberikan diklat	-	Dinas Lingkungan Hidup	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
8		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	100,00 %	Dinas Lingkungan Hidup	
Disdukcapil					
1		Penerbitan akta perkawinan	85.78 %	Disdukcapil	
2		Penerbitan akta perceraian	59.25 %	Disdukcapil	
3		Penerbitan akta kematian	100.00 %	Disdukcapil	
4		penyajian data kependudukan	84.85 %	Disdukcapil	
Keluarga Bencana					
1		Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	ada	Dinas PPKB	
2		Median Usia Kawin	21 Tahun	Dinas PPKB	

		Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun			
3		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	11/394 X 1000 = 27,01	Dinas PPKB	
4		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100.00 %	Dinas PPKB	
5		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	4	Dinas PPKB	
6		presentasi fasilitasi kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	100.00 %	Dinas PPKB	
7		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	13.79 %	Dinas PPKB	
8		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	22120	Dinas PPKB	
9		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	7.83 %	Dinas PPKB	
10		persentase kesertaan KB ibupaten dan kota dengan kesertaan rendah	24 %	Dinas PPKB	
11		Persentase kesertaan KB Penerimaan Bantuan Iuran (PBI)	65.07 %	Dinas PPKB	

1	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	35.29 %	Dinas Perhubungan	
2		Terlaksananya pelayanan uji berkala	90.71 %	Dinas Perhubungan	
3		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	100.00 %	Dinas Perhubungan	
4		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	69.69 %	Dinas Perhubungan	
5		persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	69.69 %	Dinas Perhubungan	
1	Penanaman Modal	Perda mengenai pemberian fasilitasi/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	-	DPMPTSP	
2		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	-	DPMPTSP	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
3		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	-	DPMPTSP	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan

4		Kegiatan semunar bisnis, forum, one on one meeting	-	DPMPTSP	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
5		Kegiatan pameran penanaman modal	-	DPMPTSP	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
6		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	-	DPMPTSP	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
7		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	38	DPMPTSP	
8		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	6229	DPMPTSP	
9		Laporan realisasi penanaman modal	249.446.980.393	DPMPTSP	
10		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	91 Perusahaan	DPMPTSP	
11		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	91 Perusahaan	DPMPTSP	
12		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten/kota	16	DPMPTSP	
1	Pemuda dan olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	60 orang	DISPORA	
2		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	-	DISPORA	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan

					n
3		Jumlah pemuda mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	100 Orang	DISPORA	
4		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	-	DISPORA	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
5		Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan	21 ORANG	DISPORA	
6		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	-	DISPORA	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
1	Komunikasi dan Informatika	Presentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan yang disediakan oleh dinas kominfo	78.05 %	DISKOMINFO	
2		presentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo	78.05 %	DISKOMINFO	
3		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks,	iya	DISKOMINFO	

		data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah			
4		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan subdomain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	98.28 %	DISKOMINFO	
5		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	95.12 %	DISKOMINFO	
6		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100.00 %	DISKOMINFO	
7		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100.00 %	DISKOMINFO	
8		presentase layanan SPBE (layanan publik	7.84 %	DISKOMINFO	

		dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik			
9		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan undang-undang	100.00 %	DISKOMINFO	
10		presentase layanan publik dan layanan adminitrasi yang terintegrasi dengan sistem pengubung layanan pemerintah	9.84 %	DISKOMINFO	
11		presentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	97.56 %	DISKOMINFO	
12		Persentase perangkat daerah yang menyimpandata di pusat data pemerintah	39.02 %	DISKOMINFO	
13		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	-	DISKOMINFO	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
14		Persentase data yang dapat berbagi pakai	100.00 %	DISKOMINFO	
15		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	36.59 %	DISKOMINFO	
16		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	58.39 %	DISKOMINFO	
17		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-	ada	DISKOMINFO	

		government			
18		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	63.64 %	DISKOMINFO	
19		presentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	91.80 %	DISKOMINFO	
20		Presentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanaka sesuai dengan strtegi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah di tetapkan	78.00 %	DISKOMINFO	
1	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	120.00 %	DISKOMINFO	
2		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapka prinsip- prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang	100.00 %	DISKOMINFO	

		ada pada pemerintah daerah			
3		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0.00 %	DISKOMINFO	
4		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	100.00 %	DISKOMINFO	
Statistik					
1	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	ada	DISKOMINFO	
2		Jumlah survey statistic sektoral yang dilakukan	2	DISKOMINFO	
3		Jumlah kompilasi statistiksektoral yang dilakukan	11 data	DISKOMINFO	
4		Jumlah survey statistic sectoral yang mendapat rekomendasi BPS	-	DISKOMINFO	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
5		Jumlah kompilasi statistic sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	-	DISKOMINFO	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
6		presentase kelengkapn meta data kegiatan statistik sektoral	-	DISKOMINFO	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
7		presentase kelengkapan metadata variable sektoral	-	DISKOMINFO	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan

					n
1	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	19	Dinas Pariwisata	
2		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	-	Dinas Pariwisata	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
3		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	40	Dinas Pariwisata	
4		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1	Dinas Pariwisata	
5		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	3	Dinas Pariwisata	
6		Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	0	Dinas Pariwisata	
7		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	3	Dinas Pariwisata	
8		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	225 orang	Dinas Pariwisata	
9		presentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100.00 %	Dinas Pariwisata	
10		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	7 Kelompok	Dinas Pariwisata	

1	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (investasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	5	Dinas Pariwisata	
2		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (enyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	-	Dinas Pariwisata	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
3		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	2	Dinas Pariwisata	
4		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	0	Dinas Pariwisata	
5		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	79	Dinas Pariwisata	
6		Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	-	Dinas Pariwisata	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
7		Layanan perijinan membawa cagar	-	Dinas Pariwisata	Data tidak ada,

		budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data			dilampirkan surat keterangan
8		Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	-	Dinas Pariwisata	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
9		Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	1	Dinas Pariwisata	
10		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Dinas Pariwisata	
11		peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan - sarana dan - prasarana - museum	-	Dinas Pariwisata	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
12		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	-	Dinas Pariwisata	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
13		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	-	Dinas Pariwisata	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
14		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	-	Dinas Pariwisata	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan

					n
15		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	-	Dinas Pariwisata	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
16		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	-	Dinas Pariwisata	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
17		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Pariwisata	
18		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Pariwisata	
19		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Dinas Pariwisata	
1	Kearsipan	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100.00 %	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
2		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	92.83 %	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
3		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	0.00 %	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
4		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0.05 %	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
5		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	1872	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
6		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang	-	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	Data tidak ada, dilampirkan

		sesuai NSPK			n surat keterangan
7		Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	-	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
8		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	-	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
9		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya di wewenang daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	-	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
1	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	9.47 %	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
2		Presentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	2.29 %	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
3		rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,025	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
4		persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0.00 %	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
5		Jumlah pemasyarakatan	-	Dinas Kearsipan dan	Data tidak ada,

		gemar membaca di masyarakat		perpustakaan	dilampirkan surat keterangan
1	Perindustrian	Presentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
2		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
3		presentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
4		presentase jumlah izin perluasan industri (IPI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
5		presentase data perusahaan industri di Kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
1	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin	a. 6 b. 156	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

		a.Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan			
2		presentasi penerbitan TDG	100.00 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3		presentase gudang yang tidak mempunyai TDG	71.23 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
4		presentase penerbitan STPW yang tepat waktu	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
5		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
6		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
7		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan diwilayah kerjanya	100.00 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
8		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	1.49 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
9		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
10		presentase alat ukur,takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang dalam tahun berjalan	58.27 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
11		presentase	-	Dinas	Data tidak

		kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku		Perindustrian dan Perdagangan	ada, dilampirkan surat keterangan
--	--	--	--	-------------------------------	-----------------------------------

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Hasil (outcome)

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	59,42%	Dinas Pendidikan	
2		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	102,20%	Dinas Pendidikan	
3		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	86,49%	Dinas Pendidikan	
4		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	74,87%	Dinas Pendidikan	
1	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,25%	Dinas Kesehatan	
2		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	80%	Dinas Kesehatan	
3		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	98,46%	Dinas Kesehatan	
4		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	87,45%	Dinas Kesehatan	
5		Persentase bayi baru lahir mendapatkan	90,76%	Dinas Kesehatan	

		pelayanan kesehatan bayi baru lahir			
6		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	20,47%	Dinas Kesehatan	
7		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	123%	Dinas Kesehatan	
8		persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	28,94%	Dinas Kesehatan	
9		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50,28%	Dinas Kesehatan	
10		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	45,70%	Dinas Kesehatan	
11		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	104,42%	Dinas Kesehatan	
12		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	37,99%	Dinas Kesehatan	
13		persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standa	41,63%	Dinas Kesehatan	
14		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	42,53%	Dinas Kesehatan	
1	Pekerjaan Umum	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
2		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,	-	Dinas Pekerjaan Umum dan	Data tidak ada, dilampirkan

		erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota		Penataan Ruang	surat keterangan
3		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	78,74%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	70,99%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
5		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
6		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
7		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	90,75%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
8		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
9		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
1	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak	-	Dinas Perumahan	Data tidak ada,

		huni bagi korban bencana kabupaten/kota		Rakyat dan Kawasan Pemukiman	dilampirkan surat keterangan
2		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
3		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	5,26%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
4		Berkurangnya jumlah unit RTLH (rumah tidak layak huni)	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
5		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
1	Trantibumlinmas (POL PP)	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Satpol PP	
2		persentase perda dan perkara yang ditegakan	58,97%	Satpol PP	
1	Trantibumlinmas (DAMKAR)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	289185	Damkar	
2		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	289185	Damkar	
3		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	70	Damkar	
4		Persentase pelayanan penyelamatan dan	72,22%	Damkar	

		evakuasi korban kebakaran			
5		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	17 menit	Damkar	
1	Trantibumlinmas (SOSIAL)	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	67,20%	Dinas Sosial	
2		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	Dinas Sosial	
1	Ketenagakerjaan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	66.67 %	Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM	
2		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0.05 %	Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM	
3		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	6.79 %	Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM	
4		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	2,47 %	Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM	
5		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	32,56 %	Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM	

1	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	19,72 %	Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM	
2		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	91,06 %	Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM	
1	Perlindungan perempuan dan perlindungan anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	8.62 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0.03 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
3		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,05 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	551,13	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	2255	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
1	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	5,41 %	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
1	Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota	4255,53 Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

		di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP			
1	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	-	-	
2		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	-	-	
3		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	-	-	
4		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	-	-	
5		Tersedianya tanah untuk masyarakat	-	-	
6		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	-	-	
1	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	55,16 %	Dinas Lingkungan Hidup	
2		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	78,71 %	Dinas Lingkungan Hidup	
3		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang	14,00 %	Dinas Lingkungan Hidup	

		diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota			
1	Disdukcapil	Perekaman KTP Elektronik	99,47 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	35,07 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
3		Kepemilikan akta kelahiran	97,96 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
4		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	27,50 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
1	Keluarga Bencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,49 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	
2		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	61,06 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	
3		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	23,61 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	
1	Perhubungan	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	70,3 %	Dinas Perhubungan	
2		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,32	Dinas Perhubungan	

1	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	- 79.69 %	Dinas Penanamam Modal	
1	Pemuda dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1.00 %	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0.19 %	Dinas Pemuda dan Olahraga	
3		Peningkatan Prestasi Olahraga	-	Dinas Pemuda dan Olahraga	
1	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	85.,47 %	Dinas Komunikasi dan Informasi	
2		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	16,92 %	Dinas Komunikasi dan Informasi	
3		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	63,30 %	Dinas Komunikasi dan Informasi	
1	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	46,88 %	Dinas Komunikasi dan Informasi	
1	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	97,56 %	Dinas Komunikasi dan Informasi	
2		Persentase OPD yang	97,56 %	Dinas	

		menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		Komunikasi dan Informasi	
1	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	- 66,85 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	- 62, 79 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3		Tingkat Hunian Akomodasi	4108,61	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
4		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
5		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
1	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	16, 46 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
1	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban pasal 40 dan pasal 29 undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	11 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan,	1,17 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

		pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat			
1	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
2		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
1	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	127,86 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
3		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
4		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
5		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan

		yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota			
6		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
1	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	76,85 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2		Persentase kinerja realisasi pupuk	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
3		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	58,27 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

2.2.5 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan keuangan	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	39,25 %	Badan Pengelolah Keuangan Daerah	
2		Rasio PAD	1.21 %	Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah	
3		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP level 3 berdasarkan	Inspektorat Kota Jambi	

			Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP:		
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP level 3 berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP:	Inspektorat Kota Jambi		
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	69.36 %	Badan Pengeloah Keuangan Daerah		
7	Opini Laporan Keuangan	Tahun 2010 Wajar, Tahun 2011 Wajar, Tahun 2012 Wajar, Tahun 2013 Wajar, Tahun 2014 Wajar, Tahun 2015 Tidak Menyatakan Pendapat, Tahun 2016 Wajar Tanpa Pengecualian, Tahun 2017 Wajar Tanpa Pengecualian, Tahun 2018 Wajar Tanpa Pengecualian, Tahun 2019 Wajar Tanpa Pengecualian	Badan Pengeloah Keuangan Daerah		
1	Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	91,20 %	Badan Pengeloah Keuangan Daerah	
2		Deviasi realisasi PAD terhadap	96,24 %	Badan Pengeloah	

		anggaran PAD dalam APBD		Keuangan Daerah	
3		Assets Management	iya	Badan Pengeloah Keuangan Daerah	
4		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	9,64 %	Badan Pengeloah Keuangan Daerah	
Pengadaan					
1		Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	607	Unit Pelayanan Pengadaan	
2		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	27,86 %	Unit Pelayanan Pengadaan	
3		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	95,36 %	Unit Pelayanan Pengadaan	
Kepegawaian					
1		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	183,09 %	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	
2		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	6,68 %	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	
3		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru	44,44 %	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	

		dan tenaga kesehatan)			

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Dokumen perencanaan taktis strategis yang menjadi dasar tolak ukur pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah bagi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2018-2023, disamping itu pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan.

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk membangun akuntabilitas kinerja ini dengan terus mendorong upaya pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran

kinerja (Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	KODE
1.	≥ 91	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Target Kinerja Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2020 disusun dalam bentuk laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kota Jambi untuk tahun 2020.

NO	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2019	2020			TARGET AKHIR RPJMD 2023
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1.	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	2,33	116,80	2,55	-	-	2,44
2.	Indeks profesionalitas ASN	55	91,18%	57,50	66,70	116,00%	88,00
3.	Nilai SAKIP	B	100,00%	BB	-	-	A

4.	Indeks survey persepsi korupsi	N/A	-	3,69	-	-	3,8
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,28%	97,48%	86,00%	85,51%	99,43%	88,5%
6.	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERVAL	82,00%	100,00%	80,00%	75,00%	93,75%	60,00%
7.	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100,00%	100,00%	100,00%	93,63%	93,63%	100,00%
8.	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	20,00%	100,00%	20,00%	20,00%	100,00%	20,00%
9.	Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	20,00%	100,00%	20,00%	48,71%	243,00%	20,00%
10.	Cakupan layanan infrastruktur dan utilitas	50,59%	93,27%	60,77%	65,56%	107,88%	85,79%
11.	Indeks kualitas air	32,11	88,00	38,30	39,60	103,40%	43,38
12.	Indeks kualitas udara	80,68	81,00	80,72	84,51	104,70%	91,45
13.	Indeks kualitas tutupan lahan	39,33	64,00	41,70	44,82	107,48%	61,37
14.	Persentase pembinaan, pengawasandan pelayanan perdagangan	20,00%	175,94%	52,00%	116,23%	223,52%	100,00%
15.	Skor pola pangan harapan	87,90%	100,22%	91,00%	91,50%	100,55%	92,5%
16.	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	2,35%	-	2,38%	2,29	99,22%	2,41%
17.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4,00%	201,13%	9,00%	-9,64%	-107,11%	9,00%
18.	Realisasi investasi	410 M	245,12%	430,5 M	249,4 M	68,39%	523,37 M
19.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,96%	101,21%	65,25%	64,12%	98,27%	66,00%
20.	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	7,61%	100,00%	8,54%	8,54%	100,00%	10,00%

21.	Persentase daya saing produk IKM	4,30%	448,8%	5,35%	2,8%	52,34%	8,30%
22.	Persentase koperasi berkualitas	13,00%	102,73%	19,27%	19,73%	101,46%	36,70%
23.	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,34%	-	72,35%	72,65%	100,41%	72,37%
24.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,25%	100,13%	14,61%	15,10%	103,35%	14,64%
25.	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan pendidikan	21,32%	99,90%	17,32%	17,32%	100,00%	4,32%
26.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,68	100,00%	10,69	10,92	102,15	10,72%
27.	Laju pertumbuhan penduduk	N/A	-	1,05	-	-	1,01%
28.	Persentase jumlah keluarga sejahtera	N/A	99,80%	96,46%	95,99%	99,51%	97,15%
29.	Indeks pembangunan gender	94,89	99,53%	94,91	94,60	99,73%	94,95
30.	Indeks pemberdayaan gender	68,07	102,54%	68,20	69,83	102,39%	68,50
31.	Persentase hak anak yang terpenuhi	50,00%	100,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
32.	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60,23%	101,75%	61,43%	59,15%	96,29%	66,00%
33.	Indeks pembangunan pemuda	50,00	-	50,50	-	-	52,00

Catatan :

- IKU Nomor 1, 3, dan 4 belum dapat diisi karena penilaian merupakan output dari KemenPAN RB
- IKU Nomor 27 belum dapat diisi karena penilaian merupakan output dari BPS Kota Jambi
- IKU Nomor 33 belum dapat diisi karena angka merupakan output dari Bappenas.

Dari 34 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kota Jambi pada tahun 2020, 26 indikator menunjukkan capaian \geq 91% atau lebih masuk dalam kategori SANGAT TINGGI. Tingkat ketercapaian ini

menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

Untuk sejumlah target IKU Pemerintah Kota Jambi yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100 % pada tahun 2020, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi.

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan pada Tabel diatas di poin A dapat di sampaikan bahwa semua indikator yang telah di capai dari Tahun 2019-2020 dengan realisasinya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Berdasarkan pada Tabel diatas di poin A dapat di sampaikan bahwa semua indikator yang telah di capai dari Tahun 2019-2020 dengan realisasinya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2020 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa keseluruhan sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara

yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kerjanya. Bagian yang disajikan dalam tabel dibawah ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kerjanya mencapai atau kurang dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas sasaran menunjukkan pencapaian yang sama atau kurang dari 100%.

Tingkat efisiensi tertinggi dapat terlihat pada indikator meningkatnya kualifikasi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang mencapai 62,82%, sedangkan tingkat efisiensi yang terendah ditunjukkan pada indikator meningkatnya Kualitas Penataan Aparatur Sipil Negara yang hanya memiliki tingkat efisiensi 24,60% .

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

f. Analisa Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya analisis atas efisiensi penggunaan daya dan analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

- Adanya sumber dana baik dari APBD maupun sumber lain seperti CSR dunia usaha
- Komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Jambi sebagai kota layak anak
- Tanggung jawab dari gugus tugas kota layak anak dalam pemenuhan hak anak
- Dukungan dari dunia usaha dalam bentuk dana dan program kegiatan
- Dukungan dari media dalam pengembangan kota layak anak
- Dukungan dari masyarakat dalam perwujudan kota layak anak
- Dukungan dari pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam perwujudan KLA
- Dukungan dari lembaga swadaya masyarakat
- Program inovasi pemerintah daerah dalam upaya percepatan pencapaian kota layak anak.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Kegiatan Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta kegiatan fisik lain yang menambah nilai aset pemerintah.

Tugas Pembantuan sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didesentralisasikan dan diotonomkan kepada daerah. Pemberian Tugas Pembantuan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah.

Sebagai konsekuensi penyelenggaraan tugas pembantuan ini, Pemerintah Pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Departemen/Direktorat Jenderal (Ditjen) melalui Kementerian Keuangan (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah, demikian pula Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan.

Pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Jambi tidak mendapatkan dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jambi.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

Permendagri Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menyatakan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1:

- Ayat 4 : Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
- Ayat 8 Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal;
- Ayat 9 Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

Selanjutnya pada Bab II Tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bagian Kesatu Umum Pasal 3 ayat 2 Jenis Pelayanan Dasar untuk daerah kabupaten/kota untuk pelaksanaan urusan wajib pendidikan terdiri atas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar (SD dan SMP) dan pendidikan kesetaraan;

Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 Tentang tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 3 Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun

4.1.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

NO	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2020	Sumber Dana	Realisasi keuangan	Sisa Dana (Silpa)
1	2	3	4	5	6
I	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	4,118,202,270		3,554,804,702	563,397,568
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	20,000,000	APBD	16,444,500	3,555,500
2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	286,050,000	APBD	267,305,449	18,744,551
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	1,073,410,000	APBD	979,755,000	93,655,000
4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	1,482,631,800	APBD	1,180,983,052	301,648,748
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	185,375,000	APBD	183,455,240	1,919,760
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	77,278,750	APBD	59,670,000	17,608,750
7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	139,734,520	APBD	92,160,000	47,574,520
8	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	576,667,200	APBD	503,377,200	73,290,000
9	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	277,055,000	APBD	271,654,261	5,400,739
II	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	107,300,000		102,155,421	5,144,579
10	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus	46,800,000	APBD	42,047,900	4,752,100
11	Perjalanan Dinas	60,500,000	APBD	60,107,521	392,479
III	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	350,000,000		337,219,000	12,781,000
12	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	4,500,000	APBD	4,500,000	-
13	Penyusunan Laporan Keuangan	4,250,000	APBD	4,250,000	-
14	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	341,250,000	APBD	328,469,000	12,781,000
IV	Program Peningkatan Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan	120,881,460,304		118,675,593,516	2,205,866,788
15	Penyelenggara Akreditasi PAUD dan PNF	-	APBD	-	-
NO	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	Pagu Anggaran Perubahan 2020	Sumber Dana	Realisasi keuangan	Sisa Dana (Silpa)

16	Workshop Penguatan dan Implementasi serta Penilaian Pelaksanaan Kurikulum PAUD dan PNF	-	APBD	-	-
17	Peningkatan Kelembagaan serta Sarana Prasarana PAUD dan PNF	895,110,250	APBD	880,514,707	14,595,543
18	Pengelolaan bantuan Operasional PAUD	1,046,900,000	APBD	987,000,000	59,900,000
19	Peningkatan Minat Bakat Peserta Didik PAUD dan PNF	-	APBD	-	-
20	Penyelenggaraan Pengembangan PAUD dan PNF	-	APBD	-	-
21	Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan	379,700,000	APBD	331,250,000	48,450,000
22	Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup	-	APBD	-	-
23	Penyelenggaraan Akreditasi SD	27,185,000	APBD	27,185,000	-
24	Workshop Penguatan dan Implementasi serta Penilaian Pelaksanaan Kurikulum SD	-	APBD	-	-
25	Peningkatan Sarana Prasarana SD	19,799,182,905	APBD	19,706,211,694	92,971,211
26	Pengembangan Kelembagaan SD	85,414,500	APBD	81,174,500	4,240,000
27	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah SD	62,359,989,314	APBD	61,646,197,057	713,792,257
28	Peningkatan Minat Bakat, Lomba Kreativitas dan Olahraga Peserta Didik SD	14,200,000	APBD	14,200,000	-
29	Penyelenggaraan Try Out dan Ujian Sekolah SD	146,875,000	APBD	50,875,000	96,000,000
30	Workshop Penguatan dan Implementasi serta Penilaian Pelaksanaan Kurikulum SMP	55,925,000	APBD	42,475,000	13,450,000
31	Peningkatan Sarana Prasarana SMP	6,649,800,000	APBD	6,473,934,914	175,865,086
32	Pengembangan Kelembagaan SMP	-	APBD	-	-
33	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah SMP	28,574,922,335	APBD	27,904,749,644	670,172,691
34	Peningkatan Minat Bakat, Lomba Kreativitas dan Olahraga Peserta Didik SMP	-	APBD	-	-
35	Penyelenggaraan Try Out dan Ujian Nasional SMP	54,150,000	APBD	53,150,000	1,000,000
36	Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru	202,080,000	APBD	199,580,000	2,500,000
37	Perlindungan Penghargaan dan Apresiasi Peserta Didik Berprestasi Tingkat Nasional	-	APBD	-	-
38	Orientasi Calon Kepala Sekolah serta Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah	523,700,000	APBD	212,770,000	310,930,000

39	Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengelola dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF	-	APBD	-	-
NO	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	Pagu Anggaran Perubahan 2020	Sumber Dana	Realisasi keuangan	Sisa Dana (Silpa)
40	Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengawas, Tenaga Adiministrasi Sekolah dan Tenaga Perpustakaan SD	-	APBD	-	-
41	Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengawas, Tenaga Adiministrasi Sekolah, Tenaga Perpustakaan dan Tenaga Laboratorium SMP	-	APBD	-	-
42	Perlindungan Penghargaan dan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat Nasional	-	APBD	-	-
43	Sosialisasi Tunjangan Profesi Guru	46,326,000	APBD	46,326,000	-
44	Penguatan MGMP, KKG, MKKS, MKPS, KKPS	-	APBD	-	-
45	Rapat Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	20,000,000	APBD	18,000,000	2,000,000
	JUMLAH	125,456,962,574		122,669,772,639	2,787,189,935

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari :

- APBD;
- APBN; dan
- Sumber dana lain yang sah.

Pada Tahun 2020 Anggaran Belanja OPD Dinas Pendidikan Kota Jambi adalah sebesar Rp 444.640.003.953,00 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp 392.601.906.616,00 dan Belanja Modal Rp. 52.038.097.337,00 Jika dibanding dengan jumlah anggaran Belanja tahun 2019 sebesar Rp. 509.878.705.168,00 maka tahun 2020 ini Belanja mengalami penurunan sebesar Rp. 65.238.701.215,00 atau 14,67 %. Belanja Operasi pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 392.601.906.616,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 363.976.439.190,00 atau 92,71 % dengan rincian pada tabel berikut :

Komposisi Belanja OPD Dinas Pendidikan Kota Jambi Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)
----	--------	---------------

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	392.601.906.616,00	363.976.439.190,00	92,71
2	Belanja Modal	319.183.041.379,00	292.527.848.250,00	91,65
3	Belanja Pegawai	-	-	-
4	Belanja Tak Terduga	73.206.365.237,00	71.236.297.940,00	97,31
5	Jasa Transfer	-	-	-
6	Belanja Hibah	212.500.000,00	212.293.000,00	99,90
TOTAL		392.601.906.616,00	363.976.439.190,00	92,71

Belanja Modal pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 52.038.097.337,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 51.221.181.699,00 atau 98,43 %. Adapun perincian Belanja Modal pada T.A. 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.350.664.490,00	12.825.299.590,00	96,06
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.652.233.665,00	10.622.104.946,00	99,72
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.056.000.000,00	3.931.357.040,00	96,93
4	Belanja Modal BOS	23.979.199.182,00	23.842.420.123,00	99,43
TOTAL		52.038.097.337,00	51.221.181.699,00	98,43

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

NO	NAMA	JABATAN	GOL	PENDIDIKAN
1	H. MULYADI, S.Pd, M.Pd NIP. 19710616 199801 1 001	KEPALA DINAS	Pembina Tk.I (IV/b)	S2
2	Hj. RITA KURNIAWATI, SE, ME NIP. 19650615 199903 2 003	SEKRETARIS	Pembina (IV/a)	S2
3	KURNIA ILAHI LUBIS, SE NIP. 19800821 200604 1 005	Kasubbag Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	Penata Tk.I (III/d)	S1
4	ERWIN ROSIYAN NIP. 19730913 201407 1 001	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Penata Muda (III/a)	S1
5	AHMAD ZUHRI NIP. 19850903 201001 1 003	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Pengatur (II/c)	SMA
6	ELYA KASMITA, SH NIP. 19670927 199203 2 003	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan PTP	Penata Tk.I (III/d)	S1
7	GANES YANDRA PUTRA, S.H NIP. 19630715 199003 1 005	Pranata Kearsipan	Penata Tk.I (III/d)	S1
8	HANDRA ANWAR, S.Pd.I, M.Pd NIP. 19830424 201001 1 015	Pengelola Kepegawaian	Penata (III/c)	S2
9	MARDIANY NIP. 19660923 198811 2 002	Pengadministrasi Kepegawaian	Penata Muda Tk.I (III/b)	SMA
10	MUHAMMAD ZEN NIP. 19660908 198603 1 006	Pengadministrasi Kepegawaian	Penata Muda Tk.I (III/b)	SMA
11	HAFIZUL NIP. 19630307 198203 1 005	Pengadministrasi Umum	Pengatur (II/c)	SMA
12	BUDI WICAKSONO NIP. 19710920 199002 1 001	Pramu Kebersihan	Pengatur (II/c)	SMA
13	SUWARMAN NIP. 19650831 199309 1 001	Pramu Kebersihan	Pengatur Muda (II/a)	SMA
14	SYAMSUL BAHRI NIP. 19640923 201212 1 001	Petugas Keamanan	Pengatur Muda (II/a)	SMA
15	MOHD. ROMY MARANTIKA, SE, M.Si NIP. 19740415 199903 1 004	Kasubbag Keuangan dan BMD	Pembina Tk.I (IV/b)	S2
16	HENIMARDIANI, S.Pd NIP. 19800825 201407 2 006	Bendahara	Penata Muda (III/a)	S1
17	TRIMARLENI, S.Pd NIP. 19790308 201407 2 007	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Penata Muda (III/a)	S1

18	HUSNA MARLIANA, SE, ME NIP. 19870319 200901 2 003	Penata Laporan Keuangan	Penata Muda Tk.I (III/b)	S2
19	YANTI, SE, ME NIP. 19830104 200902 2 004	Penata Laporan Keuangan	Penata (III/c)	S2
20	ROY MARTEN, S.Pd NIP. 19820318 201407 1 001	Pengolah Daftar Gaji	Penata Muda (III/a)	S1
21	M.FAUDI RAMADWIPA, SE NIP. 19950526 201903 1 003	Penata Laporan Keuangan	Penata Muda (III/a)	S1
22	HASANAH, S.Pd NIP. 19850111 201407 2 005	Pengolah Daftar Gaji	Penata Muda (III/a)	S1
23	YETI OKTAVIANI NIP. 19801017 201407 2 001	Pengadministrasi Keuangan	Pengatur Muda TK.I (II/b)	SMA
NO	NAMA	JABATAN	GOL	PENDIDIKAN
24	Dra. LILYARUDFA, M.Pd NIP. 19650703 198902 2 001	Kabid Pembinaan Paud, PNF dan Pengendalian Perizinan Pendidikan	Pembina (IV/a)	S2
25	WIKO HARYANTO, S.Pd NIP. 19790130 200902 1 001	Kasi Pengelolaan PNF	Penata Muda Tk.I (III/c)	S1
26	FARIDA NIP. 19631017 198602 2 002	Pengadministrasi Pendidikan dan Kebudayaan	Penata Muda Tk.I (III/b)	SMA
27	DESI, SH NIP. 19751203 200801 2 005	Kasi Pngelolaan PAUD	Penata Tk.I (III/d)	S1
28	ABDULLAH ALMAHDI, S.Ag NIP. 19750525 200212 1 003	Analisis Sarana PAUD	Penata Tk.I (III/d)	S1
29	RIA PRANCISKA TURISIA, S.Pd NIP.19821114 201407 2 004	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	Penata Muda (III/a)	S1
30	YURNALISMAR, SE NIP. 19691128 201212 2 001	Analisis Peserta Didik	Penata Muda (III/a)	S1
31	IWAN RIFALDO, S.Pd NIP. 19790319 200801 1 004	Kasi Pemetaan PAUD, PNF & Pengendalian Perizinan	Penata (III/c)	S1
32	JUNI, S.Pd NIP. 19660601 199602 1 001	Penyusun Data Peserta Didik	Penata Tk.I (III/d)	S1
33	SUGIYONO, S.Pd, M.Pd NIP. 19720202 199303 1 005	Kabid Pembinaan SD	Pembina (IV/a)	S2
34	ABDUL LATIP, SE NIP. 19670808 199403 1 008	Kasi Sarana dan Prasarana SD	Penata Tk.I (III/d)	S1
35	EVI WANI NIP. 19730903 201212 2 002	Pengelola Sarana dan Prasarana SD	Pengatur (II/c)	D-III
36	ANDI YULIANA SUKMAWATI, SE NIP. 19770731 201407 2 003	Analisis Sarana dan Prasarana SD	Penata Muda Tk.I (III/b)	S1
37	AZWARMAN NIP. 19720301 201407 1 004	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana SD	Pengatur Muda (II/a)	SMA

38	ERNA FITRIANI, M.Pd.I NIP. 19721110 199403 2 007	Kasi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter SD	Pembina (IV/a)	S2
39	DINA FAUZIYAH, S.Kom NIP. 19841011 201407 2 003	Analisis Peserta Didik	Penata Muda (III/a)	S1
40	MUHAMMAD, S.Ag NIP. 19671214 198603 1 001	Analisis Peserta Didik	Pembina (IV/a)	S1
41	INRIKO FARDIAN, M.Pd NIP. 19720814 200501 1 009	Kasi Kelembagaan dan Manajemen SD	Penata (III/c)	S2
42	SAJAR KN NIP. 19631231 198203 1 046	Pengadministrasian Kurikulum	Penata Muda Tk.I (III/b)	SMA
43	JUNIARTI, S.Pd.I NIP. 19860627 201407 2 002	Analisis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan	Penata Muda (III/a)	S1
44	SUPARDI, SE NIP. 19670814 198901 1 002	Kabid Pembinaan SMP	Pembina (IV/a)	S1
45	YULIANTO, M.Pd NIP. 19700701 199803 1 005	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP	Pembina (IV/a)	S2
46	SARI PUSPITA, SE NIP. 19770828 201001 2 004	Analisis Peserta Didik	Penata (III/c)	S1
47	BAWADI NIP. 19660707 199403 1 007	Pengadministrasian Peserta Didik	Penata Muda Tk.I (III/b)	SMA
48	SUPRIATI, M.Pd NIP. 19680609 199003 2 002	Kasi Kelembagaan dan Manajemen SMP	Penata Tk. I (III/d)	S2
NO	NAMA	JABATAN	GOL	PENDIDIKAN
49	SUD ANGGARA NIP. 19840424 200312 2 005	Pengadministrasian Kurikulum	Pengatur Tk.I (II/d)	SMA
50	YENNY ROSLINDAWATI, S.Pd NIP. 19710416 199401 2 001	Analisis Pelaksana Kurikulum Pendidikan	Penata Muda Tk. I (III/b)	S1
51	RD. SARWANI, SH, MPA NIP. 19671210 199602 1 003	Kasi Sarana dan Prasarana SMP	Pembina (IV/a)	S2
52	MUHAMMAD ALAMSYAH, SS NIP. 19821028 201101 1 004	Analisis Sarana dan Prasarana SMP	Penata (III/c)	S1
53	EKA SETIAWAN NIP. 19750818 199403 1 001	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana SMP	Penata Muda Tk.I (III/b)	SMA
54	M. AZMI, S.Pd NIP. 19841222 200904 1 001	Pengelola Sarana dan Prasarana SMP	Penata Muda Tk.I (III/b)	S1
55	ZULAFNI, S.Pd, M.Pd NIP. 19700316 199303 1 008	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Pembina Tk.I (IV/b)	S2
56	RUKSAH EKA DEWI, SH NIP. 19680522 199702 2 001	Kasi PTK dan Kurikulum Mulok PAUD dan PNF	Penata Tk.I (III/d)	S1
57	NANI NAFSANI, S.Pd NIP. 19630331 1986022 002	Analisis Kebutuhan PTK	Penata TK.I (III/d)	S1
58	MAIDIANA NIP. 19640508 198403 2 001	Pengadministrasian PTK	Penata Muda Tk.I (III/b)	SMA
59	DEDI MANSYAH, S.Pd NIP. 19851210 201407 1 002	Analisis Data dan Informasi PTK	Penata Muda (III/a)	S1

60	MUHAMAD HARYADI, S.Pd NIP. 19660123 198902 1 001	Kasi PTK dan Kurikulum Mulok SD	Penata Tk.I (III/d)	S1
61	SITI ROSMALA DEWI NIP. 1964 1206 198503 2 003	Pengadministrasi Sertifikasi	Penata Muda (III/a)	SMA
62	EKO SAPRIANTO SN, SH NIP. 19861018 201407 1 002	Analisis Kualifikasi dan Karir PTK	Penata Muda (III/a)	S1
63	ADE IRAWAN, S.Kom NIP. 19810121 201407 1 003	Analisis Data dan Informasi PTK	Penata Muda (III/a)	S1
64	NUR ALAMSYAH, SE NIP. 19680222 199303 1 011	Kasi PTK dan Kurikulum Mulok SMP	Penata Tk.I (III/d)	S1
65	LUTFI ANSORY, S.Pd.I NIP. 19830323 200903 1 009	Analisis Data dan Informasi PTK	Penata Tk. I (III/d)	S1
66	JOKO SYARIFUDIN, S.Pd NIP. 19630601 199403 1 002	Pengelola Data Tenaga Kependidikan	Penata Muda Tk.I (III/b)	S1

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Permasalahan utama, yaitu:

1. kurangnya komitmen dan dukungan dalam Penerapan SPM sejak dari tahapan: pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
2. kurang didukung oleh SDM yang berkompetensi dalam penerapan SPM;
3. Keberhasilan penerapan SPM sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah.

Solusi sebagai langkah langkah penyelesaian permasalahan yang diatas, yaitu:

1. Dibutuhkan komitmen dan dukungan dalam Penerapan SPM sejak dari tahapan: pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar;
2. Ketersediaan SDM yang berkompetensi dalam penerapan SPM;
3. kemampuan keuangan daerah yang memadai untuk keberhasilan penerapan SPM.

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Penghitungan capaian kinerja perlu memperhatikan karakteristik indikator kinerja yang memiliki.

Jenis Pelayanan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah;

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target Pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi dalam mencapai selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi pada tahun 2020.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air Minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	2020
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	2020

Sumber: Permendagri No.100 tahun 2018 Tentang penerapan standar pelayanan minimal

4.2.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi selama 1 Tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi, yang bersangkutan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target SPM 2020	Realisasi SPM 2020	Pencapaian
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air Minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	70.99 %	70.99 %
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	75,50%	75,50%

Sumber: Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Jambi 2020

4.2.4 Alokasi Anggaran

Realisasi anggaran kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi Tahun 2020, terdapat didalam program Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Perluasan Utilitas Perkotaan, dengan kegiatan ;

1. Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Jaringan Air Bersih/Air Minum
2. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Permukiman Penduduk dalam penerapan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	(%)
	Bidang Cipta Karya	7,552,049,000.00	7,283,101,500.00	96.66

1	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Konstruksi Air	5,666,893,000	5,452,864,500	96.22
2	Belanja Modal Pengadaan Saluran Limbah	1,885,156,000	1,830,237,000	97.09

Sumber: Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Jambi 2020

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	(%)
	Bidang Cipta Karya	6,170,267,000.00	6,170,267,000.00	100
1	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Konstruksi Air	-	-	-
2	Belanja Modal Pengadaan Saluran Limbah	6,170,267,000.00	6,170,267,000.00	100

Sumber: Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Jambi 2020

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	(%)
	Bidang Cipta Karya	355,000,000.00	354,204,000.00	99.78
1	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Konstruksi Air	355,000,000.00	354,204,000.00	99.78
2	Belanja Modal Pengadaan Saluran Limbah	-	-	-

Sumber: Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Jambi 2020

4.2.5 Dukungan Personil

Jumlah Pegawai di bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi telah dibagi dan ditempatkan mengisi struktur organisasi dinas. Jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil yang ada pada bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi Tahun 2020 adalah sebanyak 37 orang.dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Bidang Cipta Karya Keseluruhan

No	Bidang Cipta Karya	Eselon			Staf	Jumlah	Ket
		II	III	IV			

1	Kepala Bidang Cipta Karya			1		1	
2	Kasi Air Bersih		1			1	
3	Kasi PLP/P		1			1	
4	Kasi PBL		1			1	
5	Pelaksana Seksi Air Bersih	1	3		6	10	
6	Pelaksana Seksi PLP/P		4		4	8	
7	Pelaksana Seksi PBL	1	8		4	13	
8	Pelaksana Keuangan				2	2	
	Jumlah	2	18	1	16	37	

Jumlah Pegawai Bidang Cipta Karya berdasarkan jabatan

No	Jabatan	Eselon	Jumlah	Ket
1	Kepala Bidang Cipta Karya	IV/a	1	
2	Kasi Air Bersih	III/d	1	
3	Kasi PLP/P	III/c	1	
4	Kasi PBL	III/c	1	
5	Pelaksana Seksi Air Bersih	II/c	1	
		III/b	2	
		III/c	1	
6	Pelaksana Seksi PLP/P	III/c	1	
		III/b	1	
		III/a	2	
7	Pelaksana Seksi PBL	III/c	1	
		III/b	2	
		III/a	5	
		II/c	1	
	Jumlah		21	

Sumber: Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Jambi 2020

Jumlah Pegawai Bidang Cipta Karya berdasarkan jabatan

No	Jenjang Pendidikan	Teknik	Non Teknik	Jumlah	Ket
1	S2		3	3	
2	S1	10	12	22	
3	D3	1	2	3	
4	SMK	3	1	4	
5	STM	1		1	
6	SMA		4	4	
	Jumlah	15	22	37	

Sumber: Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Jambi 2020

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan yang dihadapi bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi beserta solusi terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain :

Permasalahan :

- a) Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan
- b) karena terbatas anggaran / APBD;
- c) Masih terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan;
- d) Belum sinerginya upaya implementasi SPM

Solusi

- a) Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan aplikasi realisasi pelaksanaan di sektor SPM
- b) Akan lebih diupayakan koordinasi dan sinkronisasi dalam mencari sumber-sumber dana yang lainnya terutama dana tugas perbantuan
- c) Meningkatkan kompetensi SDM yang sudah ada agar meningkat keterampilan teknis yang mumpuni
- d) Koordinasi dan Sinkronisasi validasi pendataan di sektor SPM dengan OPD terkait

Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada OPD terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Langkah-langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

4.3 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi berkaitan dengan tupoksi masing-masing bidang, antara lain:

1. Program pengembangan dan fasilitas penyelenggaraan perumahan
2. Program penataan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan
3. Program peningkatan, pemeliharaan dan penataan utilitas umum

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi yaitu 100% (Keuangan dan Fisik).

4.3.3 Realisasi

Berdasarkan target yang ditetapkan, maka realisasi yang dicapai dari masing – masing bidang antara lain:

1. Realisasi Fisik dan Keuangan Program Pengembangan dan Fasilitas Penyelenggaraan Perumahan
 - Fisik : 100%
 - Keuangan : 97,11%
2. Realisasi Fisik dan Keuangan Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan
 - Fisik : 100%
 - Keuangan : 98,87%
3. Realisasi Fisik dan Keuangan Program Peningkatan, Pemeliharaan dan Penataan Utilitas Umum
 - Fisik : 100%
 - Keuangan : 98,77%

4.3.4 Alokasi Anggaran

Dalam rangka mendukung program SPM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi memiliki alokasi dana pendukung pada masing – masing bidang antara lain:

1. Program Pengembangan dan Fasilitas Penyelenggaraan Perumahan
Alokasi dana sebesar Rp. 1.388.424.600
2. Program penataan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan
Alokasi dana sebesar Rp. 1.441.754.400
3. Program peningkatan, pemeliharaan dan penataan utilitas umum
Alokasi dana sebesar Rp. 28.260.402.100

Daftar Tabel Terlampir:

Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target Realisasi Fisik dan Pagu Anggaran		Realisasi Fisik dan Anggaran	
		K	Rp	K	Rp
Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan	Meningkatnya Kualitas lingkungan dan Permukiman Berbasis Kawasan	100%	Rp 1.441.754.400	100%	Rp 1.425.500.400
Penyelenggaraan, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	38	Rp 1.441.754.400	38	Rp 1.425.500.400
	Pelaksanaan Peningkatan Permukiman kumuh Berbasis Kawasan (Ha)	3,41		4,12	
	Perencanaan Kawasan Kumuh (Ha)	7,29		7,29	

Program Pengembangan dan Fasilitas Penyelenggaraan Perumahan	Persentase Pemenuhan Rumah Bagi IMBR dan Peningkatan PSU Perumahan yang dilakukan Penanganan dan Diserahkan ke PEMDA	100%	Rp 1.388.424.600	100%	Rp 1.348.336.470
Penyelenggaraan, Penyediaan dan Penataan Perumahan	Tersedianya Dokumen Perencanaan PSU Perumahan (Dokumen)	1	Rp 1.388.424.600	1	Rp 1.348.336.470
	Tersedianya Rumah Bagi MBR (Unit Rumah)	2000		2159	
	Terlaksananya Serah Terima PSU Perumahan (Lokasi Perumahan)	15		7	
	Tertanganinya PSU Perumahan (Lokasi Perumahan)	1		1	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan	50		36	

	Perumahan (Lokasi Perumahan)				
	Terkelolanya Rumah Susun (Lokasi)	1		1	
Program Peningkatan, Pemeliharaan dan Penataan Utilitas Umum	Persentase Permukiman yang dilayani Utilitas Umum	100%	Rp28.260.402.100	100%	Rp27.912.662.201
Pembangunan, Pemeliharaan dan Penataan Penerangan Jalan Umum	Pengadaan Lampu (Titik)	1.200	Rp 26.080.142.600	1929	Rp 25.788.433.851
	Pemeliharaan lampu (Titik)	13.500		13.500	
Peningkatan Pelayanan Pemakaman dan Penataan TPU	Jumlah Makam yang dikelola dan ditata (Lokasi)	13	Rp 2.180.259.500	13	Rp 2.124.228.350
TOTAL			Rp31.090.581.100		Rp30.686.499.071

4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil atau pegawai yang terlibat dalam Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi sebanyak 23 orang.

Yang terdiri dari :

1. Personil pada bidang perumahan : 9 Orang
2. Personil pada bidang bidang : 6 Orang
3. Personil pada bidang LPJU : 8 Orang

4.4 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Korban kebakaran adalah Korban jiwa adalah warga negara yang menerima akibat kejadian kebakaran (korban jiwa langsung) dan warga negara yang terdampak kejadian kebakaran (korban jiwa terdampak) yaitu mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, dan/atau mengalami trauma, serta dampak sosial. Korban harta benda adalah harta benda warga negara yang terkena akibat kejadian kebakaran (korban harta benda langsung) dan harta benda warga negara yang terdampak kejadian kebakaran (korban harta benda terdampak) yang meliputi musnah dan/atau rusaknya harta benda, dampak ekonomi, dan kerusakan lingkungan.

Tingkat waktu tanggap (*response time*) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara/penduduk, sampai tiba di tempat kejadian, serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan (non kebakaran). Secara operasional, waktu tanggap pemenuhan layanan pemadaman serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan nilai rata-rata capaian waktu tanggap sejak mulai diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ataupun oleh relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemerintah Daerah secara formal.

Pembentukan dan/atau pembinaan relawan kebakaran merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah, sesuai dengan kewenangan Pemerintah penyelenggaraan urusan kebakaran. Pemberdayaan masyarakat ini penting mengingat kondisi geografis dan persebaran permukiman dan penduduk pada daerah-daerah di Indonesia serta sebagai salah satu

upaya menutup keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan suburusan kebakaran.

Relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya dimaksud harus tercatat dan diformalkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah, setidaknya melalui pemberian tanda pengenal relawan kebakaran.

Selain layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban, terdapat jenis layanan penunjang lainnya yang secara factual melekat pada tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Layanan penunjang tersebut menjadi daya dukung pencapaian target SPM di daerah serta merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan.

Layanan penunjang dimaksud adalah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) yaitu peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran. Jenis dari operasi darurat nonkebakaran yang selama ini dilakukan misalnya adalah penanganan banjir, evakuasi korban hanyut, evakuasi korban terjatuh ke sumur, penanganan pohon tumbang, evakuasi sarang tawon, penanganan penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia (*animal rescue*), dan lain-lain.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target capaian SPM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah 100% hadir memberikan layanan pada setiap kejadian kebakaran bagi seluruh warga Negara. Perencanaan dan penganggaran guna pemenuhan pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (pencapaian target SPM sub Urusan Kebakaran) wajib dimuat dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah dan dokumen anggaran pemerintah daerah setiap tahunnya. Perangkat daerah yang belum mencapai target 100% wajib untuk terus meningkatkan upaya pencapaian dengan pemenuhan langkah-langkah kegiatan dan upaya-upaya sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri ini. Daerah yang telah mencapai target 100% wajib mempertahankan prestasinya dan meningkatkan kuantitas dan mutu kualitas dari tahun ke tahun.

a. Langkah Kegiatan

1. Layanan respon cepat (Respon Time) penanggulangan kejadian kebakaran
2. Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran
3. Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi

4. Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran
 5. Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran
- b. Standar Jumlah dan Kualitas Barang
1. Di setiap kantor kecamatan terdapat pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi serta ketersediaan aparatur selama 24 (dua puluh empat) jam yang dilaksanakan secara bergantian (shift)
 2. Setiap kelurahan/desa dan/atau gabungan beberapa kelurahan/desa dapat didirikan Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi serta ketersediaan aparatur
 3. Ketersediaan sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi.
- c. Standar Jumlah dan Kualitas Aparatur/Sumber Daya Manusia
1. Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
 2. Setiap 1 (satu) unit kendaraan pemadam kebakaran (mobil pemadam kebakaran) dioperasikan oleh 6 (enam) petugas damkar dengan pembagian tugas 1 (satu) orang sebagai Komandan Regu, 1 (satu) orang sebagai pengemudi sekaligus Operator Pompa, dan 4 (empat) orang anggota petugas damkar yang dilengkapi dengan alat perlindungan diri aparatur;
 3. Masyarakat dan relawan kebakaran dibawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran, antara lain Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran (BALAKAR), Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR), Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) atau sebutan lainnya; dan Setiap aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan wajib memiliki kompetensi dengan mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kapasitas baik pelatihan maupun bentuk lainnya.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi telah memasukan target SPM pada RPJMD dengan program ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kota

Jambi dari segi penganggarannya pada tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

**Target SPM pada RPJMD yang disesuaikan dengan kemampuan
Keuangan daerah Kota Jambi dari segi penganggarannya pada tahun
anggaran 2020**

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Langkah Kegiatan	Kegiatan	Anggaran
Bencana Kebakaran	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kota	100 %	a. Pemetaan potensi ancaman bencana bahaya kebakaran diseluruh jenis/tipeologi kebakaran (mitigasi) b. Penyuluhan, penyebaran informasi pelarangan dan peringatan kepada masyarakat dan dunia usaha c. Simulasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha d. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran e. Pengadaan peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran f. Pemeliharaan peralatan pendukung pemadam kebakaran dan alat evakuasi g. Pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dan dunia usaha h. Inspeksi peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran i. Investigasi aksesibilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran	1. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran 2. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 3. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual Kebencanaan 4. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	1. Rp. 16.500.000,- 2. Rp. 355.402.500,- 3. Rp. 14.650.000,- 4. Rp. 16.000.000,-
	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Respon Time Rate</i>)	19 Menit	a. Melakukan inventarisasi potensi dari bahaya kebakaran b. Melakukan inventarisasi data kasus kebakaran yang terjadi dalam jangka WMK c. Melakukan identifikasi sarana dan prasarana pada daerah rawan kebakaran d. Melakukan pengembangan wilayah manajemen kebakaran (WMK) e. Melakukan kesiapsiagaan satgas damkar f. Pengadaan alat-alat komunikasi g. Mengadakan pelatihan simulasi rutin teknis operasi bagi satgas pemadam h. Melakukan simulasi standar operasional prosedur koordinasi	1. Pengadaan Logistik dan Mitigasi Bencana 2. Kegiatan rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bahaya kebakaran 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4. Pencegahan dan Pengendalian Kebencanaan	1. Rp. 20.315.000,- 2. Rp. 3.134.547.000,- 3. Rp. 200.750.000,- 4. Rp. 334.100.000,-

	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi	100%	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pelatihan Pemadam Kebakaran 1 b. Melakukan pelatihan inspektur muda, madya dan utama c. Melakukan pelatihan instruktur muda dan madya 	1. Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1. 74.136.000,-
	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK	1 Unit Mobil Pemadam Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan mobil pemadam kebakaran, mesin pompa dan peralatan rescue lainnya b. Penyediaan garasi dan bengkel mobil pemadam kebakaran, mesin pompa dan peralatan reque lainnya 	1. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	1.Rp. 5.015.265.000,-

4.4.3 Realisasi

Teknis penghitungan capaian SPM sub urusan kebakaran dilihat dari dua indikator, yaitu indikator utama layanan SPM dan indikator penunjang layanan capaian SPM. Secara kuantitatif teknis perhitungan dituliskan:

Indikator Utama Layanan SPM Sub Urusan Kebakaran

- a) Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

i. Rumus

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun 2020 dalam tingkat waktu tanggap (*response time*) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi

X 100%

Jumlah kejadian kebakaran di Kota Jambi pada Tahun 2020

- b) Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi

i. Rumus

Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota pada Tahun 2020 dalam tingkat waktu tanggap (*response time*) Oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi

x 100 %

Jumlah kejadian kebakaran di kota Jambi pada Tahun 2020

- c) Capaian SPM adalah (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan). Ditambah (Layanan Pemadaman

yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar dan/atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah).

- 1) Indikator Penunjang Layanan Capaian SPM
 - a) Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah.
 - i. Rumus
Jumlah dan Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kota Jambi dalam tahun X.
 - ii. Satuan Indikator Jumlah dan Jenis

Perhitungan

Selama Tahun 2020, pada Kota Jambi terjadi 54 kali kebakaran pemukiman/perumahan dan lahan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi memberikan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam rentang waktu tanggap (*response time*) sebagai berikut :

1.	7 Menit	:	1 Kali Kejadian
2.	10 Menit	:	3 Kali Kejadian
3.	11 Menit	:	1 Kali Kejadian
4.	12 Menit	:	2 Kali Kejadian
5.	13 Menit	:	1 Kali Kejadian
6.	14 Menit	:	1 Kali Kejadian
7.	15 Menit	:	17 Kali Kejadian
8.	16 Menit	:	3 Kali Kejadian
9.	17 Menit	:	6 Kali Kejadian
10.	18 Menit	:	4 Kali Kejadian
11.	19 Menit	:	3 Kali Kejadian
12.	20 Menit	:	12 Kali Kejadian

Jumlah keseluruhan korban jiwa kebakaran dan terdampak kebakaran adalah 70 (Tujuh Puluh) Kepala Keluarga. Petugas pemadam kebakaran berhasil melakukan pertolongan dan penyelamatan terhadap 70 (Tujuh Puluh) kepala keluarga. Ada 2 (dua) korban yang meninggal dunia.

Berdasarkan analisa dari kejadian kebakaran (*assessment*) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, diperoleh data taksiran kerugian harta benda akibat kebakaran adalah Rp.2.671.000.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

Selain kejadian kebakaran, selama Tahun 2020 juga terdapat layanan penyelamatan dan evakuasi terhadap keadaan yang membahayakan kondisi manusia (operasi darurat non kebakaran) sejumlah 130 (seratus tiga puluh) kali, terdiri dari penanganan bencana banjir 6 (enam) kali, penanganan Rumah Roboh 2 (dua) kali, angin putting beliung 2 (dua) kali, evakuasi korban tenggelam 2 (dua) kali, evakuasi dari binatang berbahaya 97 (Sembilan puluh tujuh) kali, penyelamatan warga dari pohon tumbang 2 (dua) kali dan evakuasi korban lainnya 18 (delapan belas) kali.

Cara menghitung capaian SPM Sub Urusan Kebakaran di Kota Jambi pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Diketahui:

- ✓ Jumlah kejadian kebakaran di Kota Jambi = 54 (lima puluh empat) kejadian.
- ✓ Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah dalam waktu tanggap = 39 (tiga puluh sembilan) kejadian
- ✓ Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemda dalam waktu tanggap = 3 Kejadian
- ✓ Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani diluar waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan/atau relawan kebakaran = 15 (lima belas) kejadian
- ✓ Jumlah kejadian yang membahayakan kondisi manusia (operasi darurat non kebakaran) sejumlah 130 kali, terdiri dari penanganan bencana banjir 6 (enam) kali, penanganan Rumah Roboh 2 (dua) kali, angin putting beliung 2 (dua) kali, evakuasi korban tenggelam 2 (dua) kali, evakuasi dari binatang berbahaya 97 (Sembilan puluh tujuh) kali, penyelamatan warga dari pohon tumbang 2 (dua) kali dan evakuasi korban lainnya 18 (delapan belas) kali.

Penghitungan layanan SPM Sub Urusan Kebakaran dan layanan penunjang capaian SPM adalah:

1. Layanan SPM Sub Urusan Kebakaran
 - a) Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Rumus:

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Jambi dalam tingkat waktu tanggap (*response time*) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi

$$= \frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di Kota Jambi pada Tahun 2020}}{54} \times 100\%$$

$$= \frac{39}{54} \times 100\%$$

$$= 72.22 \%$$

- b) Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan (Balakar dan/atau lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Rumus:

Jumlah layanan pemadaman di Kota Jambi Tahun 2020 dalam tingkat waktu tangga (*response time*) Oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah

$$= \frac{\text{Jumlah kejadian kebakaran di Kota Jambi Tahun 2020}}{54} \times 100\%$$

$$= \frac{3}{54} \times 100\%$$

$$= 5.5 \%$$

Capaian layanan SPM Sub Urusan Kebakaran di Kota Jambi adalah = 72.22% + 5.55 % = 77.77 %

2. Layanan Penunjang Capaian SPM

- a. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Rumus

Jumlah dan Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kota Jambi dalam Tahun 2020 = 130 (seratus tiga puluh) kali layanan yang terdiri dari:

- a) Penanganan bencana banjir 6 (enam) kali
- b) Penanganan Rumah Roboh 2 (dua) kali
- c) Angin putting beliung 2 (dua) kali

- d) Evakuasi korban tenggelam 2 (dua) kali
- e) Evakuasi dari binatang berbahaya 97 (Sembilan puluh tujuh) kali
- f) Penyelamatan warga dari pohon tumbang 2 (dua) kali
- g) Evakuasi korban lainnya 18 (delapan belas) kali.

Dari data diatas, penulisan pelaporan pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran adalah:

- 1) Capaian SPM Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di Kota Jambi pada Tahun 2020 adalah 77.77% (tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh).
- 2) Layanan penunjang berupa penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) sejumlah 130 (seratus tiga puluh) kali terdiri dari:
 - a) Penanganan bencana banjir 6 (enam) kali
 - b) Penanganan Rumah Roboh 2 (dua) kali
 - c) Angin putting beliung 2 (dua) kali
 - d) Evakuasi korban tenggelam 2 (dua) kali
 - e) Evakuasi dari binatang berbahaya 97 (Sembilan puluh tujuh) kali
 - f) Penyelamatan warga dari pohon tumbang 2 (dua) kali
 - g) Evakuasi korban lainnya 18 (delapan belas) kali.
- 3) Jumlah korban jiwa yang berhasil diselamatkan adalah 70 (tujuh puluh) kepala keluarga, tidak terdapat 2 korban meninggal dunia maupun mengalami luka bakar dan luka fisik lainnya.
- 4) Jumlah aset yang berhasil diselamatkan sebesar Rp.2.671.000.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

Dari data tersebut diatas diketahui bahwa target pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran sebesar 100% (seratus persen) belum tercapai. Daerah yang belum mencapai target 100% (seratus persen) wajib untuk terus meningkatkan upaya pencapaian dengan pemenuhan langkah-langkah kegiatan dan upaya-upaya sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri ini.

Daerah yang telah mencapai target wajib mempertahankan prestasi dan kinerja, serta terus meningkatkan kuantitas dan mutu kualitas layanan dari tahun ke tahun.

4.4.4 Alokasi Anggaran

Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tahun 2020

NAMA KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	Target Fisik Keuangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.206.579.000	100%
Penyediaan jasa surat menyurat dan Perizinan	68.500.000	100%
Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	225.000.000	100%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	230.000.000	100%
Penyediaan Jasa Pendukung/Tenaga Adminitrasi/Teknis Perkantoran	58.640.000	100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor. Barang Cetak dan Penggandaan	49.000.000	100%
Penyediaan Makanan dan Minuman	5.000.000	100%
Pengadaan. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	192.439.000	100%
Pengadaan. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	362.400.000	100%
Pembangunan. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	15.600.000	100%
Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	513.030.000	100%
Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta perlengkapannya	357.530.000	100%
Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus	0	0%
Perjalanan Dinas	155.500.000	100%
Program Perencanaan. Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	9.750.000	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	5.750.000	100%
Penyusunan Laporan Keuangan	4.000.000	100%
Program Peningkatan Kesiagaan Dini dan Manajemen Logistik Kebencanaan	9.212.135.500	100%
Bimbingan Teknis. Diklat dan Sosialisasi Penanganan Bencana	74.136.000	100%
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran	16.500.000	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	5.015.265.000	100%

Pengadaan Logistik Mitigasi Bencana	20.315.000	100%
Pencegahan dan Pengendalian Kebencanaan	334.100.000	100%
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	2.570.000	100%
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran	355.402.500	100%
Kemitraan Asuransi Jiwa dan Kesehatan Satgas Kebencanaan	27.900.000	100%
Kegiatan Rekrutmen Tenaga Sukarela Penanggulangan Bencana	3.134.547.000	100%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebencanaan	200.750.000	100%
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	-	100%
Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual kebencanaan	14.650.000	100%
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	16.000.000	100%
TOTAL	10.941.494.500	

4.4.5 Dukungan Personil

Jumlah personil di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi sebanyak 204 orang yang terdiri 65 orang PNS dan 139 orang tenaga kerja kontrak. Dari jumlah personil sebanyak 204 orang tersebut, 16 orang adalah pejabat struktural, 27 orang pelaksana administrasi dan 38 orang anggota pemadam kebakaran. Selain pegawai juga terdapat relawan satuan tugas penanggulangan bencana yang berjumlah 139 orang.

Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 4.3
Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	65	32 %
2.	Tenaga Kerja Kontrak	139	68 %
	JUMLAH	204	100 %

Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi merupakan salah satu organisasi publik yang melayani masyarakat selama 1x24 jam sama halnya seperti TNI-POLRI dan Pelayanan Rumah Sakit. Bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi tidak mengenal hari libur, baik hari minggu, libur nasional , ataupun hari besar

keagamaan, seperti hari raya idul fitri, idul adha, dan hari natal. Guna untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan berkualitas maka diwajibkan kepada seluruh anggota pemadam kebakaran di Indonesia termasuk di Kota Jambi (Petugas Teknis Lapangan khususnya Bidang Operasional Pemadaman Kebakaran) agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya penuh tanggung jawab. Jam kerja 1 x 24 jam ini merupakan sebuah konsekuensi logis apabila seseorang memutuskan untuk menjadi seorang Ksatria Biru atau pasukan Yudha Brama Jaya atau yang lebih populer dengan anggota pemadam kebakaran.

Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi jam kerja dibagi menjadi 3 regu yaitu regu 1, regu 2 dan regu 3 dengan sitim piket. Masing-masing regu jam kerjanya 24 jam, dimulai dari jam 07.15 wib s.d. 07.15 wib, kemudian dilanjutkan dengan regu yang berikutnya. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 2.3

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan Pencapaian Standard Pelayanan Minimal (SPM) baik eksternal maupun internal serta Solusi penanganannya sebagai berikut :

1. Untuk Indikator Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dalam Standard Pelayanan Minimal (SPM) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan belum berjalan optimal, hal ini dapat terlihat dengan belum tercapainya target yang telah ditetapkan. Ketidak optimalan ini dapat terjadi karena tidak meratanya Pos Pelayanan Kebakaran, hal ini dapat diminimalisir dengan cara pembangunan Pos Pelayanan Kebakaran disetiap Kecamatan Kota Jambi.
2. Indikator SPM yang kedua yaitu Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time Rate*) sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 17 menit. Untuk mencapai target Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time Rate*) tahun 2023 yaitu 15 menit, untuk itu diperlukan pembangunan Posyankar disetiap kecamatan dan kendaraan operasional dalam kondisi prima.
3. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar merupakan penunjang utama dalam kelancaran operasionalisasi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, dalam hal ini Indikator ini belum mencapai target yang ditentukan karena belum meratanya pengetahuan dan kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran. Langkah yang harus dilakukan yaitu dengan memaksimalkan atau bahkan menambah Bimbingan Teknis dan Diklat Pemadam, serta dengan mengirim lebih banyak pasukan untuk peningkatan

kompetensi dengan cara mengikuti Diklat Kejuruan yang diselenggarakan oleh Kemendagri atau Pemadam Provinsi DKI Jakarta.

Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 Liter, tahun 2020 penambahan mobil Pemadam Kebakaran sebanyak 3 unit, ini merupakan akumulasi dari pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran di Tahun sebelumnya.

B. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Nasional	Tahun			Gap	Ket.
				2019	2020	2021		
I	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Jumlah warga negara yang mendapat layanan Akibat Penegakan Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	(100)%	Kurangnya SDM yang Profesional sehingga banyak laporan yang belum dapat diselesaikan, juga kurangnya tenaga PPNS

4.4.2 Realisasi

PERHITUNGAN BIAYA SPM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM/ KEGIATAN	KOMPONEN DAN BIAYA		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
			SATUAN	HARGA SATUAN	VOLUME	JUMLAH	VOLUME	JUMLAH		
I	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada							
		a	Pengaman, Pengawalan Dan Penertiban Serta Pendataan dan Pemetaan Rawan Trantibum dan Tranmas .	Kali	14,878,048	41	610,000,000			
		b	Sosialisasi, Pengawasan, Penyidikan Dan Penegakan Regulasi Daerah	Orang	1.760.000	196	4,620,918,400			
JUMLAH						5,230,918,400				

4.4.3 Permasalahan Solusi

Permasalahan Non Teknis

1. Kurangnya Staf yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi yang khusus bertugas mencatat dan menyiapkan setiap data yang diperlukan dalam penyusunan SPM.
2. Kurangnya Sosialisai untuk semua Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi akan pentingnya SPM dalam setiap indicator yang ada, sehingga Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi seluruhnya dapat bekerja guna pemenuhan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.
3. Tidak adanya dana yang digunakan untuk melatih beberapa Anggota Satuan Polisi Pamong Kota Jambi Praja agar kedepannya penyusunan laporan SPM dapat berjalan terus-menerus dalam setiap tahunnya
4. Kurangnya anggota Linmas yang ada dengan jumlah luas wilayah yang besar dengan jumlah Kecamatan sebanyak 12 (Dua Belas) dan jumlah TPS sebanyak 720 (*Data KPU Kab.Kota Jambi*) yang mana setiap TPS harus dijaga minimal 2 (dua) orang Anggota Linmas.
5. Kurangnya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi yang dapat mengoperasikan komputer dengan baik dan mahir.
6. Kurangnya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi jika dibandingkan dengan luas wilayah kerja yang begitu luas.
7. Kurangnya pemahaman setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi akan setiap Tugas Pokok dan Fungsi tiap-tiap Seksi yang ada.
8. Kementerian Lembaga yang terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dikatakan kurang sosialisasi, Koordinasi dan monitoring kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam program percepatan SPM juga dilingkungan Provinsi.

Permasalahan Teknis

9. Data di PD tidak tersedia (terdokumen secara baik) sejumlah kegiatan dilaksanakan belum tercatat dengan akurat.
10. Daya serap PD terhadap penerapan SPM kurang. Terkesan PD dipaksa untuk membuat laporan. Hal ini disebabkan karena para pimpinan di daerah kurang mengetahui kebijakan Nasional ini secara baik.
11. Belum Optimalnya pemetaan daerah-daerah yang rawan Gangguan Trantibum dan Tranmas dengan Benar.
12. Belum adanya UPTD Sat pol pp, Yang saat ini tidak atau belum terakomodir semua oleh Kota.
13. Belum maksimalnya Parana dan Prasara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi
14. Kurangnya tenaga terlatih di Bidang nya, Khusus Penegakan Perda dan Perkada.

Tindak Lanjut

1. Perlu adanya Penambahan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.
2. Perlu adanya Sosialisasi kepada Anggota Satuan Polisi pamong Praja Kota jambi tentang SPM.
3. Perlu adanya pelatihan-pelatihan bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota jambi dalam penyusunan SPM.
4. Perlu adanya Penambahan Anggota Linmas.
5. Perlu adanya Pemetaan yang akurat terhadap daerah rawan Gangguan Trantibum Dan Tranmas.
6. Perlu adanya Pembentukan UPTD di beberapa Kecamatan yang Rawan Gangguan Trantibum dan Tranmas.
7. Perlu adanya pengadaan sarana dan prasarana pendukung lainnya yang memadai.

Perlu adanya pelatihan bagi anggota Satpol pp kota Jambi, Tentang Perda dan Perkada yang akan di dilakukan penegakan.

Lebih lanjut kriteria, permasalahan, dan tindak lanjut yang diperlukan terkait dengan Kendala/ Permasalahan yang di hadapi dengan tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka percepatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi berikut ini :

KRITERIA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Indikator	Perlu dilakukan peninjauan kembali, dengan menambahkan Indikator yang sesuai dengan didaerah	Perlu adanya Indikator yang lebih rinci dari setiap pelayanan Dasar yang dilakukan dengan disesuaikan pada Tupoksi
Penentuan Rumus	Penentuan rumus tidak mengalami kendala hanya kurang terinci	Perlu Adanya Penajaman kata-kata mengenai hal-hal yang menjadi pembilang dan penyebut
Data dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya data yang diperoleh dikarenakan jumlah Kecamatan yang banyak yang Kesemuanya Belum ada UPTD. • Dengan jumlah Kecamatan yang banyak mengakibatkan perlu adanya tenaga Linmas dan Kelompok Patroli siaga yang banyak. • Belum adanya Perda mengenai Tindak Asusila yang dilakukan Kaum LGBT/Bencong sehingga tidak Ada Tindak Lanjut Pasca Operasi. • Belum adanya Pemetaan daerah-daerah rawan Trantibum dan Tranmas. • Kuranya staf yang bertugas khusus mendata seluruh data yang diperlukan dalam SPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya pembentukan UPTD di Setiap Kecamatan Yang Rawan Trantibum dan Tranmas. • Perlu adanya penambahan Anggota Satpol pp dan Linmas. • Perlu adanya Pemetaan daerah-daerah rawan Trantibum dan Tranmas yang kemudian di tuangkan dalam perda UPTD Tantibum dan Tranmas kota jambi. • Perlu adanya pembinaan staf mengenai SPM
Tupoksi Satpol PP	<ul style="list-style-type: none"> • Satpol PP Kota Jambi yang saat ini Berdiri sendiri yang tidak bergabung dengan Pemadam Kebakaran. • Kurangnya sarana pendukung Tupoksi guna mendapatkan target SPM yang ditentukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Akan lebih mudah untuk menjalani Tufoksinya. • Perlu adanya Penambahan Sarana dan Prasarana yang memadai guna pencapaian SPM

Pembinaan Kementerian atau lembaga	Pembinaan baru dilaksanakan oleh Biro organisasi	Perlunya adanya pembinaan lanjutan dan dukungan sarana dan prasarana dari Kementerian yang terkait mengenai SPM
Pembinaan Gubernur selaku wakil pemerintah	Telah dilakukan oleh pembinaan dari PD Teknis dalam penyusunan SPM tetapi tidak pada Masing-Masing PD bersangkutan sehingga diperoleh kesamaan antar Satpol PP Kabupaten dan Provinsi	Perlu adanya Pembinaan lanjutan dari Satpol PP Provinsi dan dukungan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Provinsi terkait mengenai SPM
Pembinaan Walikota Pemerintah	Telah dilakukan oleh Bagian Organisasi Setda Kota Jambi	Perlu ada Pembinaan Lanjutan dari Bagian Organisasi Setda Kota Jambi dan dukungan sarana dan prasarana guna mencapai target SPM

4.5 URUSAN SOSIAL

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan Dasar Sosial di Kota Jambi terdiri atas rehabilitasi sosial di daerah kota jambi terdiri atas :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantardiluar panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnyagelandangan dan pengemus diluar panti
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelahtanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kota jambi

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian standar pelayanan minimal yaitu 100%

4.5.3 Realisasi

1. Persentase pelayanan korban bencana alam dan sosialyang tertangani yaitu 100%
2. Persentase PMKS terlantar diluar panti yang tertanganiyaitu 68,81%

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pada Dinas Sosial Kota Jambi yaitu Rp.3.507.422.461

4.5.5 Dukungan Personil

Pegawai ASN Dinas Sosial, TKK, pendamping PKH, Tagana,TKSK, LKS, dan Karang Taruna Kota Jambi

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

- a. Permasalahan Belum optimalnya pelayanan bagi PMKS
- b. Solusi
Pemerintah Kota Jambi telah menyediakan rumah singgahuntuk mengoptimalkan pelayanan bagi PMKS

4.7.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

- Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pelayanan Kesehatan Balita
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi
- Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

4.7.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%)

Tabel
Indikator dan Nilai SPM

NO	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Indikator	Nilai (%)		
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	2020	Dinkes Kota Jambi

2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	100	2020	Dinkes Kota Jambi
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	2020	Dinkes Kota Jambi
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	2020	Dinkes Kota Jambi
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	2020	Dinkes Kota Jambi
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100	2020	Dinkes Kota Jambi
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	2020	Dinkes Kota Jambi
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	100	2020	Dinkes Kota Jambi
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	100	2020	Dinkes Kota Jambi
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100	2020	Dinkes Kota Jambi
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	100	2020	Dinkes Kota Jambi
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100	2020	Dinkes Kota Jambi

4.7.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Kota Jambi tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel
Realisasi

No	INDIKATOR	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL				
	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan	11.571	100	11.393	98,46
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN				
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	11.044	100	9.658	87,45
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR				
	Jumlah bayi baru lahir usia 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	11.044	100	10.024	90,76
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA				

	Jumlah balita 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan belita sesuai	58.894	100	12.058	20,47
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN				
	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining	11.626	100	14.322	123,11
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA				
	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu	330.985	100	95.798	28,94
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA				
	Jumlah pengunjung usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal	31.509	100	13.401	42,53
8	PELAYANAN KESEHATAN PADA PENDERITA				
	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	108.748	100	54.674	50,27
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES				
	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	45.176	100	20.647	45,70
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)				
	Jumlah ODGJ berat di kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun	1.109	100	1.158	104,41
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG				
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	14.170	100	5.383	37,98
12	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO				

Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasvankes dalam	11.786	100	4.907	41,63
---	--------	-----	-------	-------

4.7.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2020 di Dinas Kesehatan Kota Jambi dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kota Jambi berjumlah Rp. 201.002.615.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1) APBD Kota Jambi	: Rp.174.485.455.000,-
2) DAK (DAK FISIK) Bidang Kesehatan	: Rp.13.257.665.000,-
3) APBD Provinsi Jambi	: -
4) APBN (DAK Non Fisik)	:
BOK	: Rp.10.981.635.000,-
AKREDITASI PUSKESMAS	: Rp. 1.141.116.000,-
JAMPERSAL	: Rp. 889.129.000,-
DAK BADAN POM	: Rp.247.615.000,-
AKREDITASI LABKESDA	: -

4.7.5 Dukungan Personil

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Jambi tahun 2020 sebanyak 101 orang dengan perincian pendidikan formal sebagai berikut :

a. PNS / CPNS	=	101 orang
b. PTT Pusat & Provinsi	=	-
c. PTT Kabupaten (daerah)	=	-
d. Sukwan kategori II	=	-

Jumlah PNS/ CPNS sebanyak 101 orang, berdasarkan pendidikan formal dengan perincian sebagai berikut :

a) S2	=	17 orang
b) S1	=	42 orang
c) D4	=	orang
d) D3	=	16 orang
e) D2	=	-
f) D1	=	orang
g) SLTA, SMF, SMAK, SPRG, SPK, SPAG	=	26 orang
h) SLTP	=	-
i) SD	=	-

4.7.6 Permasalahan dan Solusi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kota Jambi dengan target 100% tiap tahunnya, SPM ini ada 12 indikator, dari 12 indikator ini ada 2 indikator yang memenuhi SPM. Dengan persentase capaian 100%. Ini terlihat di tabel realisasi capaian SPM. Untuk 10 indikator yang tidak memenuhi capaian SPM beserta permasalahan dan solusinya adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil

Masalah :

Tidak tercapainya target SPM dikarenakan jika dilihat lebih lanjut, dari 10 standar pelayanan ANC yang harus dilakukan ada beberapa pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan gula darah termasuk dengan integrasi program yaitu pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA), Sipilis, pencegahan malaria dalam kehamilan (PMDK), TB Paru, kecacingan, pencegahan IMS, pencegahan Hepatitis B yang tidak dilakukan pada sebagian ibu hamil oleh petugas kesehatan sehingga kualitas dari pelayanan ANC pada ibu hamil tidak optimal.

Solusi :

Upaya tindak lanjut untuk mencapai target yang akan datang adalah :

- Melaksanakan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di setiap kelurahan.
- Melaksanakan kelas ibu hamil di setiap kelurahan dan puskesmas.
- Supervisi fasilitatif pelayanan kesehatan ibu terintegrasi dengan program lain.
- Pemenuhan buku KIA bagi setiap ibu hamil.
- Pemenuhan Alat Deteksi Risiko Kehamilan (ADRK).
- Pemenuhan pencatatan dan pelaporan (kohort) di puskesmas dan jejaringnya.
- Pelaksanaan konseling kesehatan reproduksi bagi semua calon pengantin.
- Peningkatan kompetensi petugas melalui orientasi ANC terpadu dan terstandar.
- Penguatan pelaksanaan Pencegahan Penularan dari ibu ke Anak/Bayi (PPIA).
- Pertemuan dan penguatan Audit Maternal Perinatal (AMP) surveilans dan respon.
- Pelaksanaan Maternal Death Notification (MDN) dalam Surveilans kematian ibu.

2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Masalah :

Tidak tercapainya target SPM ini mungkin disebabkan kurangnya koordinasi antara puskesmas dengan bidan praktek swasta, dokter praktek swasta klinik dan rumah sakit pemerintah maupun swasta terkait laporan

Solusi :

Upaya tidak lanjut yang akan dilakukan adalah :

- Pemenuhan sarana prasarana di puskesmas dan jejaringnya sesuai standar untuk meningkatkan cakupan pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- Peningkatan kompetensi petugas dalam pelayanan Post Natal Care (PNC).
- Orientasi dan magang bagi Tim Pelayanan Obstetri dan Neonatal Dasar (PONED) di Puskesmas PONED (rawat inap).
- Optimalisasi pemanfaatan dana Jampersal bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
- Orientasi penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal bagi petugas puskesmas.
- Pertemuan dan penguatan Audit Maternal Perinatal (AMP) surveilans dan respon.
- Pelaksanaan Maternal Death Notification (MDN) dalam Surveilans Kematian.

3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Masalah :

Tidak tercapainya target SPM ini disebabkan beberapa hal yaitu masih terdapat persalinan yang pelayanan bayi baru lahirnya tidak sesuai standar (minimal 3 kali) sampai usia 28 hari, dan meningkatnya jumlah kematian neonatus dibandingkan tahun sebelumnya.

Solusi :

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang akan datang adalah :

- Penguatan Pelayanan Bayi Baru Lahir (BBL), termasuk Skrining HipotiroidKogenital (SHK).
- Orientasi pelayanan kesehatan neonatal essensial.
- Pemenuhan obat, bahan habis pakai dan alat-alat kesehatan di puskesmas dan jejaringnya.
- Optimalisasi pelaksanaan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM).
- Peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan manajemen asfiksia bayi baru lahir dan BBLR.
- Pelaksanaan orientasi kegawatdaruratan maternal neonatal.
- Orientasi kader posyandu sebagai motivator ASI.

4. Pelayanan kesehatan balita

Masalah :

Tidak tercapainya target SPM ini mungkin disebabkan kurangnya frekuensi penimbangan pada anak balita usia 12-59 bulan dan pelaksanaan SDIDTK, selain itu telah selesai imunisasi dasar lengkap anak balita sudah mulai jarang dibawa ke Posyandu. Pada tahun 2020 juga terjadi pandemic Covid-19 anak-anak diharapkan tidak keluar rumah sementara waktu sehingga menyebabkan menurunnya kehadiran

balita ke Posyandu. Namun upaya tetap dilakukan baik oleh petugas kesehatan maupun kader posyandu untuk melakukan kunjungan rumah agar pertumbuhan balita tetap terpantau.

Solusi :

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang akan datang adalah :

- Orientasi SDIDTK dan sosialisasi kelas ibu balita bagi kader kesehatan, guru PAUD/TK/RA.
- Orientasi dan pendampingan kalakarya Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).
- Koordinasi penguatan penggunaan buku KIA.
- Pemantaupemanfaatan Kohor Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah.
- Updating pelayanan kesehatan balita bagi bidan/nakes di desa.
- Pemenuhan vitamin A, suplemen gizi balita, dan makanan tambahan bagi balita baik untuk penyuluhan maupun pemulihan.
- Pemenuhan sarana prasarana pemantauan pertumbuhan di posyandu melalui partisipasi dana desa.
- Peningkatan kompetensi kader posyandu dalam membantu pemantauan pertumbuhan balita di posyandu.
- Peningkatan pengetahuan dan kompetensi kader melalui orientasi Pemberian Makan bagi Bayi dan Anak (PMBA).
- Peningkatan pengetahuan dan kompetensi kader posyandu dalam penyusunan menu makanan tambahan melalui orientasi penyusunan menu makanan tambahan balita berbahan dasar pangan lokal.

5. Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Masalah :

Tidak tercapainya target SPM dikarenakan :

- Belum memasyarakatnya program “CERDIK”
- Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang penyakit tidak menular
- Tidak adanya dukungan lintas sektor tentang pelaksanaan skrining faktor resiko penyakit tidak menular
- Masyarakat beranggapan kalau pemeriksaan itu hanya untuk orang yang sakit bukan untuk orang yang sehat
- Pelaksanaan skrining FR PTM bertepatan dengan aktifitas masyarakat
- Angka estimasi terlalu tinggi
- Kurangnya kapasitas petugas
- Kurangnya minat masyarakat tentang program pelayanan kesehatan pada usia produktif
- Kurangnya pembiayaan untuk kegiatan pelayanan kesehatan pada usia produktif

Solusi :

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang akan datang adalah :

- Penambahan kapasitas petugas kabupaten dan Puskesmas
- Penambahan biaya untuk transportasi petugas kab. Monitoring kegiatan
- Penambahan biaya untuk sosialisasi dan transportasi
- Penambahan biaya pengadaan bahan habis pakai
- Penambahan biaya sosialisasi program CERDIK

6. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Masalah :

Tidak tercapainya target SPM antara lain disebabkan belum semua kelurahan mempunyai Posyandu para lansia tidak semua mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Selain itu masih banyak lansia yang dalam kegiatan sehari-harinya harus ditolong sepenuhnya (tingkat kemandirian A) sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan posyandu lansia. Dari semua puskesmas baru 5 (lima) puskesmas yang dapat melaksanakan home care sehingga tidak semua lansia yang tidak hadir di posyandu lansia tidak dilakukan kunjungan rumah untuk mendapatkan pelayanan sesuai standar.

Solusi :

Upaya untuk mencapai target yang akan datang, dilakukan

beberapa kegiatan :

- Pembentukan posyandu lansia di semua kelurahan.
- Peningkatan kemampuan puskesmas untuk dapat melaksanakan pelayanan kesehatan santun lansia.
- Peningkatan kapasitas petugas puskesmas untuk dapat melakukan home care melalui pelatihan/orientasi caregiver bagi lanjut usia.
- Advokasi ke pemerintahan desa untuk membentuk dan melatih kader posyandu lansia serta pemberian insentifnya dengan menggunakan dana desa.

7. Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi

Masalah :

Tidak tercapainya target SPM dikarenakan :

- Tingkat pengetahuan, gaya hidup, pola makan dan budaya di tengah masyarakat tidak bisa diubah
- Angka estimasi terlalu tinggi
- Kurangnya kapasitas petugas
- Kurangnya minat masyarakat tentang program pelayanan penderita hipertensi
- Kurangnya pembiayaan untuk kegiatan pelayanan penderita hipertensi

Solusi :

Upaya untuk mencapai target yang akan datang :

- Penambahan kapasitas petugas kabupaten dan puskesmas
- Penambahan biaya untuk transportasi petugas kab. Monitoring kegiatan
- Penambahan biaya untuk sosialisasi dan transportasi
- Penambahan biaya pengadaan bahan habis pakai
- Penambahan biaya sosialisasi program CERDIK

8. Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus

Masalah :

Tidak tercapainya target SPM dikarenakan :

- Masyarakat kalau tidak diperiksa GDS dan diberi obat mereka tidak mau diskriming FR PTM
- Terbatasnya posbindu kit untuk pemeriksaan FR PTM

Solusi :

Upaya untuk mencapai target yang akan datang adalah :

- Penambahan kapasitas petugas kabupaten dan puskesmas
- Penambahan biaya untuk transportasi petugas kab. Monitoring kegiatan
- Penambahan biaya pengadaan bahan habis pakai
- Penambahan biaya sosialisasi program CERDIK

9. Pelayanan kesehatan orang dengan TB

Masalah :

Tidak tercapainya target SPM dikarenakan :

- Belum optimalnya kegiatan kontak treading terhadap pasien positif TBC.
- Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan khususnya di TB 06.

Solusi :

Upaya untuk mencapai target yang akan datang yaitu :

- Mengoptimalkan kegiatan kontak treading terhadap keluarga pasien dan tetangga disekitar pasien.
- Melakukan sosialisasi dan bintek kepada petugas laboratorium puskesmas dan rumah sakit tentang pencatatan dan pelaporan TB 06.

10. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

Masalah :

Tidak tercapainya target SPM dikarenakan :

- Belum optimalnya kegiatan kontak treading terhadap pasien positif HIV.
- Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan khususnya di TB 06.

Solusi :

Upaya untuk mencapai target yang akan datang yaitu :

- Mengoptimalkan kegiatan kontak tracing terhadap keluarga pasien dan tetangga disekitar pasien.
- Melakukan sosialisasi dan bintek kepada petugas laboratorium puskesmas dan rumah sakit tentang pencatatan dan pelaporan TB 06.

BAB V

P E N U T U P

Dari seluruh kewenangan wajib dan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada daerah, Pemerintah Kota Jambi telah melaksanakannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, agar terpadu dan terarah Pemerintah Kota Jambi, menjabarkannya kedalam Rencana Pembangunan Lima Tahunan (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) dan kebijakan umum Pemerintah Kota Jambi dan selanjutnya dijabarkan lagi didalam Renstra dari masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jambi (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing – masing. Selanjutnya untuk implementasi dari Dokumen Perencanaan yang telah disepakati bersama, maka semua program yang ada di masing – masing SKPD dihimpun dan dibahas secara bersama – sama dan selanjutnya dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk merealisasi kegiatan yang telah disusun haruslah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menggambarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun sumber dana yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan lainnya yang sah.

Untuk menjaga agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, berbagai unsur tetap melakukan pengawasan dan memantau kegiatan dimaksud, baik dari lembaga pengawas intern maupun pengawas ekstern seperti BPK, Badan Pengawas Kota, DPRD, LSM, masyarakat maupun organisasi lainnya.